

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN BEASISWA MISKIN
SEKOLAH DASAR (BSM-SD) DI SEKOLAH DASAR
KECAMATAN KELAM PERMAI
KABUPATEN SINTANG**



TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

THOMBES KADUKAI FELIPUS

NIM. 016758818

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013**

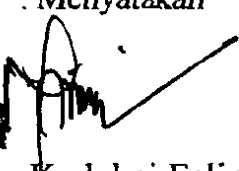
**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Penyaluran Bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) Di Sekolah Dasar Desa Bengkuang Kecamatan Kelay Permai Kabupaten Sintang adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Sintang, Agustus 2013

: Menyatakan



Thombes Kadukai Felipus
NIM. 016758818

**METERAI
TEMPEL**
C10D7ABF560068556
6000 **DJP**

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

Judul TAPM : **Implementasi Penyaluran Bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) Di Sekolah Dasar Desa Bengkuang Kecamatan Kelay Permai Kabupaten Sintang**

Penyusun TAPM : **THOMBES KADUKAI FELIPUS**

NIM : **016758818**

Program Studi : **ADMINISTRASI PUBLIK**

Menyetujui:

Pembimbing I

Dr Fatmawati, M.Si.
NIP.

Pembimbing II,

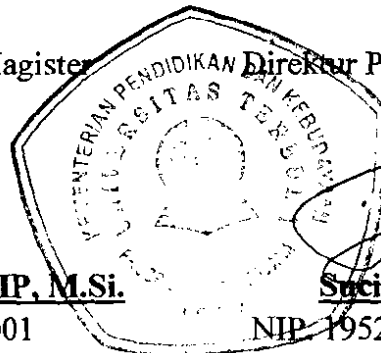
Dr Tita Rosita, M.Pd.
NIP.

Mengetahui:

Ketua Bidang Ilmu/Program Magister
Administrasi Publik

Florentina Ratih Wulandari, S.IP, M.Si.

NIP. 19710609 199802 2 001



Direktur Program Pascasarjana

Suciati, M.S, Ph.D

NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

NAMA : Thorubes Kadukai Felipus
NIM : 016758818
PROGRAM STUDI : Magister Ilmu Administrasi Publik
JUDUL TAPM : implementasi Penyaluran Bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di Sekolah Dasar Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang

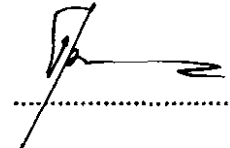
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Minggu/01 Desember 2013
Waktu : 19.00 – 21.00 WIB

Dan telah dinyatakan **LULUS**

Panitia Penguji TAPM

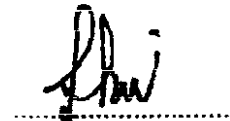
Ketua Komisi Penguji :
Dr. Tita Rosita, M. Pd



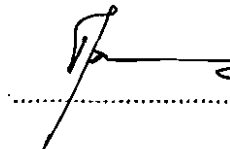
Penguji Ahli :
Prof. Dr Muchlis Hamdi, M.Si



Pembimbing I :
Dr. Fatmawati, M. Si



Pembimbing II :
Dr. Tita Rosita, M. Pd



ABSTRAC**IMPLEMENTATION POLICY OF SCHOLARSHIP DISTRIBUTION FOR POOR ELEMENTARY SCHOOL STUDENT AT BENGKUANGS ELEMENTARY SCHOOL IN KELAM PERMAI DISTRICT, SINTANG SUB-PROVINCE.**

Thombes Kadukai Felipus

Universitas Terbuka

The distributing scholarship policy of Poor Elementary school student (BSM-SD) has been one of form of policy of government educational in overcoming impact of crisis befalling Indonesian nation these days. One of location in Kabupaten Sintang which has executed this program is Elementary School in Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai. But in reality, there are still school age children in Desa Bengkuang who has not got education service, because reason of economics factor that is unsatisfying supports. However there are distribution of Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) has been since the year 2004 to assist schoolboy coming from indigent family.

Mechanism of scholarship for poor students of Elementary school (BSM-SD) still facing problem krusial. Determination of student which will receive scholarship fully in the School Committee authority however the school committee whose actually unable to comprehend condition of student family objectively. System target in determining group of grantee candidate target clearly express that there are still strong of centralization pattern in determination and allocation Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD). Goal setting with this system will deflect in field, which was particularly because of position from school committee in determination of scholarship fairly Information about scholarship, which is not is patched in the school information board (happened in elementary school at research area), which it can push information deviation in determining of scholarship candidate. Student who have not been enough information about the scholarship, they could not propose theirselves or through its(the old fellow to obtain) scholarship.

Keyword: Distribution, Policy, Implementation Scholarship for Poor Student of Elementary school.

ABSTRAK

Mekanisme Penyaluran Bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) Di Sekolah Dasar Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang

THOMBES KADUKAI FELIPUS

Universitas Terbuka

thombes@yahoo.com

Kata Kunci: Penyaluran, Beasiswa Miskin Sekolah Dasar

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan penyaluran bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Kepala Sekolah, Orang Tua Siswa, Komite Sekolah, Siswa miskin penerima beasiswa serta siswa miskin bukan penerima beasiswa.

Hasil analisis yang dilakukan terhadap data penelitian dalam mengungkap dan menjawab pertanyaan bagaimana mekanisme serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan penyaluran bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, yaitu mekanisme Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) masih menghadapi masalah krusial. Mekanisme belum berjalan optimal, karena dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut, kepemimpinan Kepala Sekolah yang belum memadai, koordinasi yang lemah, ketersediaan anggaran pemerintah belum memadai, tingkat pemahaman isi kebijakan serta kontrol masyarakat yang masih rendah.

Sebagai kesimpulan penelitian ini adalah mekanisme penyaluran bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang belum berjalan optimal, sehingga tujuan kebijakan tersebut belum dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

KATA PENGANTAR

Mengawali Kata Pengantar ini, pertama-tama puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmad dan hidayah-Nya jualah, akhirnya penyusunan TAPM yang berjudul Mekanisme Penyaluran Bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (Bsm-Sd) Di Sekolah Dasar Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang dapat penulis selesaikan. Adapun Penelitian TAPM ini disusun untuk diajukan guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister Administrasi Publik pada UPBJJ-UT 47 Pontianak.

Selanjutnya, dalam menyelesaikan penulisan ini, Penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dengan segala kerendahan hati melalui halaman ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak khususnya kepada

1. Prof. Tian Belawati selaku Rektor Universitas Terbuka Jakarta
2. Suciati, M.Sc, Ph.D. selaku Direktur Universitas Terbuka Jakarta yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Pontianak.

3. Florentina Ratih Wulandari, S.IP, M.Si. selaku Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis selama mengikuti studi.
4. Kepala Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak yang telah memberikan saran dan masukan serta motivasi kepada penulis selama mengikuti studi.
5. Pembimbing Pertama penulisan TAPM ini. Beliau dengan penuh ketelitian dan kesabaran tak henti-hentinya memberikan saran-saran dan masukan dalam penyempurnaan tulisan ini
6. Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu mengarahkan penulis dalam menyusun TAPM ini.
7. Bupati Sintang dan Wakil Bupati Sintang serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang yang telah memberikan ijin dan dorongan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Kepala Sekolah, Orang Tua Siswa, Komite Sekolah, Siswa Miskin dengan sikap tulus dan terbuka memberikan informasi dan kesediaan waktu kepada penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan demi penyelesaian tesis ini.

Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa.
Amin.

Sintang, Desember 2013

Penulis,


Thombes Kadukai Felipus
NIM. 016758818

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAC.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kajian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teoritis.....	11
1. Implementasi Kebijakan.....	11
2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	17
3. Program Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM- SD).....	49
C. Kerangka Pikir Alur Penelitian.....	55
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Desain Penelitian.....	56
B. Subjek Penelitian.....	56
C. Instrumen Penelitian.....	56
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	57
E. Metode Analisis Data.....	58
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Gambaran Umum Sekolah Dasar Negeri 04 Bengkuang.	60
B. Implementasi penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD).....	64
1. Penentuan Kriteria Calon Siswa Penerima Beasiswa.	64
2. Mekanisme Penetapan Siswa Penerima Beasiswa.....	74
3. Mekanisme Pengambilan Dana Beasiswa.....	81
4. Penggunaan Dana Beasiswa.....	88
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Penyaluran Beasiswa Bagi Siswa Miskin Jenjang Sekolah Dasar.....	90
1. Komunikasi.....	90
2. Sumber Daya.....	92

3. Disposisi.....	94
4. Struktur Birokrasi.....	102
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	105
A. Simpulan.....	105
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
1.1.	Jumlah Siswa Miskin siswa Sekolah Dasar di Desa Bengkuang dan SDN Engkaras Kecamatan Kalam Permai Tahun 2012	3
4.1.	Jumlah Murid Masing-Masing Kelas Pada Sekolah Dasar Negeri 04 Bengkuang Keadaan Sampai Dengan Bulan April Tahun 2013	60
4.2.	Jumlah Murid Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Sekolah Dasar Negeri 04 Bengkuang Keadaan Sampai Dengan Bulan April Tahun 2013	61
4.3.	Jumlah Guru Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan Pada Sekolah Dasar Negeri 04 Bengkuang Keadaan Sampai Dengan Bulan April Tahun 2013	61
4.4.	Sarana dan Prasarana Pada Sekolah Dasar Negeri 04 Bengkuang Keadaan Sampai Dengan Bulan April Tahun 2013	62
4.5.	Daftar Siswa Penerima BSM-SD Pada SDN No.04 Bengkuang Tahun 2012	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
2.1.	Kerangka Pikir Alur Penelitian	55
4.1.	Pendataan dan Pengusulan Calon Penerima Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar di Kabupaten Sintang	76
4.2.	Alur Penyaluran Dana Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar di Kabupaten Sintang	83
4.3.	Struktur Organisasi Tim Pengelola Dana Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar di Kabupaten Sintang	103

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Proses pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dewasa ini, pendidikan merupakan faktor penting yang menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan peningkatan mutu pendidikan di negara sedang berkembang, maka pemerintah dan swasta terus berupaya mewujudkan amanah tersebut melalui berbagai upaya, usaha pembangunan di bidang pendidikan yang sekaligus merupakan salah satu bidang terpadu dari pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu pembangunan SDM diperlukan adanya pelayanan bantuan di bidang pendidikan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Tiga misi yang melatarbelakangi pembangunan nasional di bidang pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia, dan mengembangkan dirinya. Atas dasar itu maka dilakukan berbagai kebijakan pemerintah khususnya program di bidang pendidikan yang diberikan dalam bentuk pelayanan bantuan pendidikan, baik itu berupa program jangka pendek maupun jangka panjang.

Pelayanan jangka panjang selalu ditunjukkan untuk seluruh masyarakat tanpa membedakan status atau kelompok sasaran program, sementara pelayanan program jangka pendek diberikan kepada masyarakat atau kelompok

pelayanan program jangka pendek diberikan kepada masyarakat atau kelompok sasaran program tertentu. Salah satu bentuk program jangka pendek ini adalah pelayanan atau bantuan yang diberikan khusus kepada murid sekolah sebagai sasaran dengan status berasal dari keluarga kurang mampu yang diberi nama penyaluran beasiswa bagi siswa miskin jenjang sekolah dasar.

Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dibidang pendidikan dalam mengatasi dampak dari krisis yang menimpa bangsa Indonesia dewasa ini. Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2004 hingga kini pelaksanaannya telah memasuki beberapa tahap dengan karakteristik sebagai program penyelamatan, sesuai dengan Permendiknas Nomor : 39 Tahun 2008, Tentang Pembinaan Kesiswaan. Dengan demikian penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) ini didesain hanya dalam kurun waktu yang relatif pendek sampai krisis dapat teratasi.

Kelompok sasaran dari program ini adalah anak-anak usia sekolah dengan status dari keluarga kurang mampu, sehingga selaras dengan salah satu misi pendidikan nasional adalah meningkatkan kualitas pendidikan dengan harapan akan terwujudnya kualitas manusia yang seutuhnya. Sebagai unit pelaksana penyaluran Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten dan Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan maupun di Desa. Salah satu lokasi di Kabupaten Sintang yang telah melaksanakan program ini adalah Sekolah Dasar di Desa Bengkuang Kecamatan Kalam Permai.

Banyak tugas yang berhubungan dengan kepemimpinan Kepala Sekolah. Salah satu diantaranya adalah melaksanakan fungsi pengambilan keputusan dalam menetapkan siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD).

Kepala Sekolah sebagai pimpinan di tingkat sekolah paling tidak mengetahui tingkat ekonomi dari siswa atau anak didiknya khususnya di Sekolah Dasar di Kecamatan Kalam Permai. Kepala Sekolah harus mempunyai sensitifitas terhadap kondisi anak didiknya. Sensitifitas ini berupa kepedulian Kepala Sekolah terhadap kelangsungan pendidikan siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Kalam Permai untuk menyelesaikan pendidikan dasar. Kepala Sekolah harus bisa memilih dan memilah anak-anak yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan berupa beasiswa sesuai dengan mekanisme penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) Dengan rasa kepedulian dari Kepala Sekolah diharapkan tidak ada siswa Sekolah Dasar di Desa Bengkuang yang putus di tengah jalan. Oleh karena itu peran Kepala Sekolah dalam penyaluran beasiswa harus bisa tepat sasaran. Berikut . Jumlah siswa miskin siswa Sekolah Dasar di Desa Bengkuang Kecamatan Permai Tahun 2012

Tabel 1.1. Jumlah Siswa Miskin siswa Sekolah Dasar di SDN 04 Kecamatan Kalam Permai Tahun 2012

NO.	Kelas	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	III	4	7	11
2	IV	6	5	11
3	V	9	11	20
Jumlah		19	23	42

Sumber: Dokumen SDN Nomor 04 Bengkuang, 2012

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa jumlah siswa miskin di SDN 04 Bengkuang sebanyak 42 orang. Ini berarti apabila siswa tersebut tidak dibantu melalui beasiswa bisa menyebabkan siswa yang bersangkutan berhenti di tengah jalan karena tidak mampu untuk membayar uang sekolah. Oleh karena itu perhatian kepala sekolah terhadap siswa miskin sangat diperlukan agar siswa yang bersangkutan bisa menyelesaikan pendidikan dasar.

Kepala Sekolah berfungsi sebagai edukator bertugas melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Kepala Sekolah selaku manajer mempunyai tugas menyusun perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengkoordinasian kegiatan belajar mengajar. Kemudian Kepala Sekolah sebagai administrator mengatur administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan serta sarana dan prasarana. Selain itu Kepala Sekolah sebagai supervisor bertugas melaksanakan supervisi mengenai proses belajar mengajar. Sedangkan sebagai Motivator, Kepala Sekolah memberikan motivasi bekerja kepada guru dan warga sekolah dalam proses belajar mengajar.

Namun kenyataannya, masih ada anak usia sekolah di Desa Bengkuang yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan, karena alasan faktor ekonomi yang kurang mendukung. Padahal sudah ada penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) yang mulai sejak tahun 2004 untuk membantu murid sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu yang penyalurannya dilaksanakan pada bulan juli sampai dengan bulan desember setiap tahun anggaran melalui Kantor Pos atau lembaga yang ditunjuk Pemerintah.

Masih adanya sebagian siswa kurang mampu yang belum mendapatkan

Beasiswa, tidak menetapkan siswa miskin yang berprestasi sesuai kriteria yang

ada dalam pedoman pelaksanaan BSM-SD di Desa Bengkuang menandakan bahwa belum semua permasalahan kekurangmampuan murid dapat teratasi. Selain itu, kondisi belum semua murid terdata sebagai penerima beasiswa merupakan tanggungjawab kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai administrator yang bertugas mengurus kesiswaan seharusnya bisa mendata dengan cermat siswa yang kurang mampu sesuai dengan pedoman pelaksanaan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD), sehingga siswa tersebut tidak terkendala masalah keuangan. Untuk itu langkah-langkah pengusulan dan penetapan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) perlu dipahami dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam rangka penyaluran beasiswa bagi siswa kurang mampu, sehingga diharapkan tidak ada lagi siswa yang tidak tamat sekolah dasar, khususnya siswa sekolah dasar di Desa Bengkuang dari langkah-langkah itu pada bahasan ini dibatasi ditingkat sekolah sesuai dengan kriteria-kriteria penerima Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD). Dalam pengusulan dan penetapan tersebut kepala sekolah diberi wewenang untuk menentukan siswa penerima Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD).

Sehubungan dengan permasalahan terhadap pelaksanaan penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) oleh kepala sekolah sebagai pelaku kebijakan yang memiliki peran penting dalam penyaluran program penyelamatan anak-anak dari keluarga kurang mampu dalam mendapatkan pendidikan, maka penulis merasa tertarik mengkaji permasalahan tersebut, dalam kaitannya dengan penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar di Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, perumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, dan agar penelitian ini terarah, maka ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Koordinasi dalam penentuan kriteria calon siswa penerima beasiswa
3. Penetapan siswa penerima beasiswa
4. Pengambilan dana beasiswa
5. Penggunaan dana beasiswa

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang perumusan permasalahan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah implementasi penyaluran bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang?
- b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan penyaluran bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam perumusan masalah dan sub-sub masalah yang ada, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis:

- a. Implementasi penyaluran bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyaluran bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.

E. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian diharapkan hasilnya dapat dipergunakan dan dimanfaatkan, baik kepada diri sendiri maupun kepada masyarakat serta semua pihak yang merasa terlibat didalamnya. Sejalan dengan tujuan penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan dan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan wacana pemikiran dan dapat memberikan kontribusi dalam khasanah ilmiah dalam pengembangan ilmu administrasi negara khususnya khususnya menyangkut tentang teori kebijakan publik khususnya penyaluran BSM-SD.

- b. Manfaat Praktis adalah sebagai berikut:

1. Bagi siswa penerima beasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya bagi orang tua murid sehingga timbul pemahaman dan pengertian mereka mengenai penyaluran bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang
2. Bagi Kepala Sekolah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan dengan penyaluran bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar

(BSM-SD) di Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.

3. Bagi Pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengambil langkah – langkah kebijakan mengenai penyaluran bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD).

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Penelitian yang berkenaan dengan bantuan Beasiswa Miskin bagi siswa sudah pernah dilakukan sebelumnya. Sutanto (2002) dengan judul: Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan (Studi kasus Pemberian Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional di Propinsi DKI Jakarta) yang melakukan penelitian mengenai Pemberian Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional di Propinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutanto (2002) tersebut memperlihatkan bahwa dalam implementasinya, kebijakan JPS khususnya Pemberian Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional dihadapkan pada kelemahan desain kebijakan berupa masih sangat kuatnya budaya dan pola sentralisasi. Hal ini sebetulnya tidak dapat disalahkan karena merupakan derivasi dari sistem pemerintahan dan politik dalam kerangka makro, yang pada saat kebijakan didesain masih bersifat sentralistis. Penentuan kelompok sasaran dan pengalokasian dana beasiswa serta bantuan operasional pendidikan dengan pendekatan proyek dan target, bukan saja telah menyebabkan tidak akuratnya penentuan kelompok sasaran, tetapi juga menyebabkan biasanya implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan Pemberian Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional disamping sangat dipengaruhi oleh desain kebijakan itu sendiri, juga sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh pemahaman aparat atau manusia

pelaksana kebijakan. Komite sekolah yang mengambil secara kolektif dana beasiswa dan memotongnya untuk berbagai kepentingan siswa yang bersangkutan, merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam implementasi kebijakan Pemberian Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional. Karena dilakukan oleh semua komite sekolah pada semua daerah penelitian, maka hal ini sangat mungkin disebabkan oleh lemahnya pemahaman komite sekolah atas isi dan petunjuk teknis Pemberian Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional. Lemahnya daya kontrol masyarakat dalam implementasi kebijakan Pemberian Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional, juga menyebabkan tidak terkendalinya penyimpangan implementasi kebijakan.

Perbedaan dengan kajian penelitian ini, jika Sutanto tentang pelaksanaan Beasiswa BOS, maka peneliti mengkaji tentang beasiswa siswa miskin di SD sesuai Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Mekanisme Penyaluran oleh Kepala Sekolah.

Selanjutnya, berkenaan dengan Kepemimpinan Kepala Sekolah Dasar, penelitian serupa pernah dilakukan oleh Simson (2007) yang berjudul: Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Guru Pada Sekolah Dasar Negeri I Sungai Ukoi. Hasil penelitian ini mengungkapkan Teknik Kepemimpinan Kepala Sekolah meliputi teknik menyiapkan orang-orang supaya mau menjadi pengikut; memperlakukan orang-orang sebagai manusia, bukan sebagai alat; menjadi tauladan bagi pengikut; persuasi dan pemberian perintah; menggunakan sistem komunikasi

yang cocok serta memberi fasilitas-fasilitas untuk menjalankan pekerjaan dengan baik. Dari berbagai teknik tersebut sebagian besar belum dapat diterapkan oleh Kepala Sekolah. Fungsi Kepemimpinan Kepala Sekolah Dasar baik sebagai pendidik (*educator*), pengelola (*manager*), sebagai pengurus (*administrator*), sebagai penyelia (*supervisor*) maupun sebagai penggerak (*motivator*). Dari berbagai fungsi tersebut sebagian sudah diterapkan oleh Kepala Sekolah, namun sebagian lagi belum dilaksanakan. Pengaruh kepemimpinan Kepala Sekolah terlihat dari tingkat disiplin dan prestasi guru.

Perbedaan dengan kajian penelitian ini, jika Simson mengkaji masalah kinerja Kepala Sekolah dalam fungsi kepemimpinan di Sekolah, penelitian ini lebih difokuskan pada kebijakan Kepala Sekolah yang bertanggungjawab dalam menentukan siswa miskin yang berhak mendapatkan beasiswa.

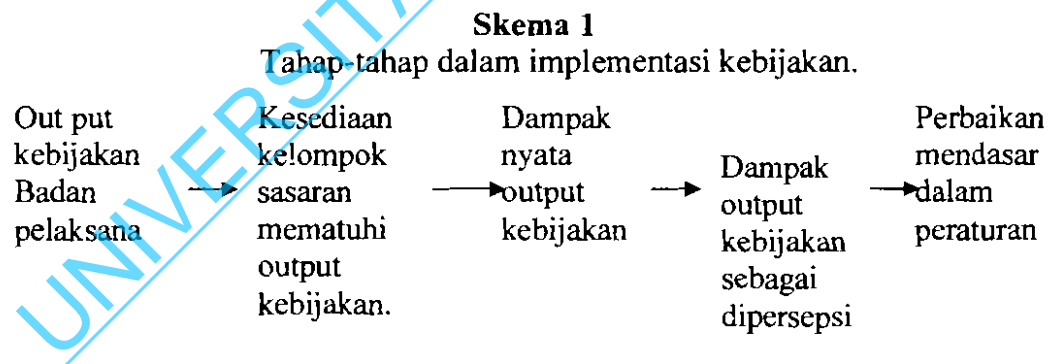
B. Kajian Teoritis

1. Implementasi Kebijakan

Webster (dalam Putra, 2001) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden). Pada sisi lain, Van Mater dan Van Horn (1975), mengatakan bahwa “ *policy implementation encompasses those action by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions*” makna

yang bisa ditangkap dari pernyataan itu adalah bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak aktualnya.

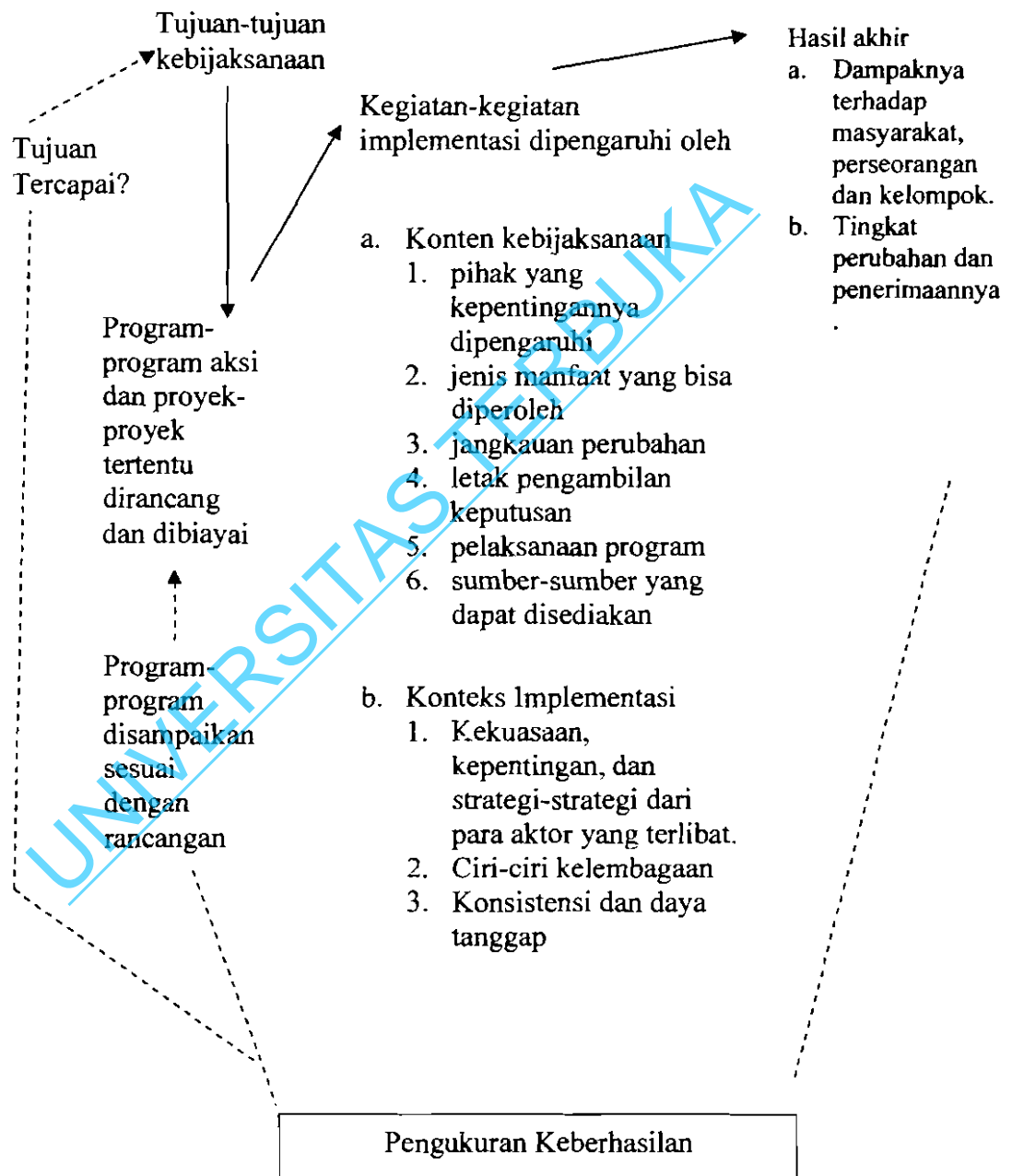
Selanjutnya rangkaian proses implementasi kebijakan menurut Sabatier dan Mazmanian (dalam Wahab, 2001) akan terlihat dalam skema berikut :



Sementara itu Menurut Grindle (dalam Wahab 1990) proses implementasi kebijaksanaan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tugas-tugas dan sasaran tersebut.

Untuk lebih jelasnya implementasi kebijaksanaan terungkap pada gambar berikut:

Skema 2
Implementasi Kebijakan sebagai proses politik dan administrasi.



Kebijakan publik dalam realisasinya perlu dianalisa secara cermat agar diketahui sampai berapa jauh memberikan manfaat bagi publik. Pengertian Analisa Publik menurut (Muhadjir, 2000) adalah “Disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan”.

Berhasil tidaknya suatu kebijakan dapat diketahui melalui evaluasi kebijakan dengan yang memiliki fungsi menurut Dunn (dalam, Muhadjir, 2000) sebagai berikut :

1. Memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
2. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemikiran tujuan dan target.
3. Memberi sumbangan pada aplikasi dan metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, merupakan ukuran dalam penilaian kebijakan tersebut. Namun kebijakan publik apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hogwood dan Gunn (Wahab, 2001) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ini dalam 2 (dua)

kategori, yaitu *non implementation* (tidak terimplementasikan) dan *unsuccesfull implementation* (implementasi yang tak berhasil).

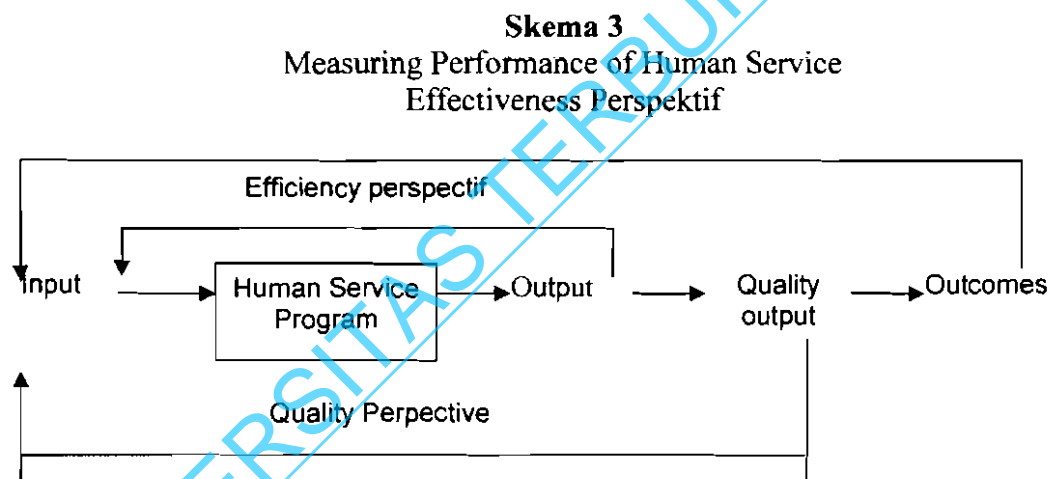
Kegagalan kebijakan publik menurut Andrew Dunsire (Wahab, 2001) dinamakan sebagai *implementation gap*, yaitu suatu istilah yang dimaksudkannya untuk menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan). Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada apa yang disebut oleh Walter Williams (Wahab, 2001) sebagai *implementation capacity* dari organisasi/ aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan (dalam dokumen formal) dapat dicapai.

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan sasaran merupakan ukuran dalam penilaian kebijakan. Pengukuran dimaksud sebagaimana pendapat Van Meter dan Van Horn (1975) adalah bahwa : Suatu kebijakan tentulah menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kegiatan kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dari sasaran tersebut.

Menurut Martin dan Kettner (1996) bahwa ukuran pelaksanaan kebijakan mengkombinasikan tiga perspektif pertanggungjawaban yaitu :

(1) perspektif efisiensi (*efficiency perspective*), (2) Perspektif kualitas (*quality perspective*), (3) Perspektif efektifitas (*effectiveness perspective*).

Dari ketiga perspektif tersebut menunjukkan perbedaan konsep program pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan, serta penekanan pada perbedaan feedbacknya. Selanjutnya rangkaian perspektif menurut Martin dan Kettner seperti skema berikut.



Sumber: Martin dan Kettner (1996)

Dari gambar tersebut Martin dan Kettner (1996) menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Output* (hasil kerja kebijakan) untuk mengukur efisiensi kebijakan, apakah hasil yang dicapai sesuai dengan biaya (*cost*) yang dikeluarkan.
2. *Quality output* (mengukur kualitas kebijakan) apakah kualitas yang dilakukan dalam program ini memuaskan kelompok sasaran.
3. *Outcomes* (dampak kebijakan) yaitu dampak jangka panjang pelaksanaan suatu kebijakan. Sedangkan efektifitas merupakan *policy*

action yang diambil atau ditempuh, mampu mencapai *policy goal* yang diinginkan karena setiap kebijakan mempunyai tujuan.

Sebagai indikator dari ketiga pelaksanaan kebijakan tersebut (*output, quality output dan outcomes*) memiliki perbedaan antara satu sama lainnya. Lebih lanjut Martin dan Kettner (1996) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan terdiri atas *policy goal, policy outcomes* dan *policy performance (policy output + policy goals)*. Apabila *policy outcomes* jauh dibawah *policy goal*, maka *policy performancenya* rendah. Akan tetapi bila *policy outcomes* jauh lebih tinggi dari *policy goals*, maka *policy performance* (pelaksanaan kebijakan) tinggi.

Secara lebih rinci dapat dikemukakan bahwa di dalam perpektif *policy outcomes* itu sendiri terdiri atas : (1) *economic benefit*, (2) *subject well being*, (3) *equity*, dan (4) *integration social*. Keempat perspektif indikator pengukuran tersebut perlu diperhatikan di dalam kebijakan publik. Namun bukan berarti keempat perspektif tersebut diukur atau digunakan secara bersamaan, akan tetapi dipilih sesuai dengan tingkat kebutuhan dalam penelitian (Martin dan Kettner, 1996).

2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Dalam menganalisis proses implementasi kebijakan penyaluran bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD), maka seperti diketahui, keberhasilan program dapat dikaji dari dua perspektif yang berbeda, yaitu dari sudut proses (implementasi) dan hasil (*outcomes*).

Perspektif yang pertama menekankan pada konsistensi antara pelaksanaan program dan kebijakan dengan *policy guidelines*. Menurut perspektif ini, suatu program pemerintah dikatakan berhasil kalau pelaksanaan program itu sesuai dengan *policy guidelines* yang telah ditentukan. Dari tinjauan *outcomes*, suatu program dapat dinilai berhasil kalau program itu menghasilkan dampak seperti yang diinginkan. (Dwiyanto, 1999).

Bila dihubungkan dengan penulisan tesis ini, maka faktor-faktor penyebab yang dapat di *treatment* melalui suatu kebijakan (*actionable causes*) adalah merupakan variabel terpengaruh (*dependent variable*), dalam hal ini yang dimaksudkan adalah proses implementasi penyaluran bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD), dimana terhadap faktor ini akan dilihat dalam pelaksanaannya yang disesuaikan dengan perundang-undangan yang ditetapkan, sehingga di dalam implementasinya akan terlihat tahapan proses yang dilaksanakan menuju sasaran dan manfaat program kebijakan yang dicapai, sesuai dengan tujuan kebijakan bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD).

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penyaluran bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) adalah faktor bebas (*independent variable*) diperoleh dari model yang dikembangkan oleh Sabatier dan Masmanian (Wahab, 2001) yang mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan formal dari keseluruhan proses implementasi kebijakan yaitu : (1)

Karakteristik masalah seperti ketersediaan teknologi dan teori teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, prosentase kelompok sasaran dibanding jumlah penduduk, ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan, (2) kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, seperti kejelasan dan konsistensi tujuan, teori kausal yang memadai, sumber keuangan yang mencukupi, integrasi organisasi pelaksana, diskresi pelaksana, rekrutmen pejabat pelaksana, akses formal pihak luar, (3) Faktor-faktor yang diluar peraturan seperti kondisi sosial ekonomi, dukungan publik, sikap dan sumber daya, dukungan kewenangan, komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana.

Dalam konstelasi faktor yang dominan mempengaruhi proses implementasi kebijakan tersebut adalah faktor isi kebijakan dalam konteks kebijakan seperti tersedianya sumber daya, karakteristik pelaksana kebijakan, karakteristik administrasi dan organisasi, serta aspek waktu seperti *service delivery* dan *compliance*, disamping peristiwa atau kejadian tertentu pada saat implementasi kebijakan mempengaruhi asumsi kontinuitas, baik karakteristik kegiatan kebijakan, administrasi dan pelaksana dalam menjalankan tujuan dari kebijakan sebagai mandat yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam kaitan itu terhadap kelima variabel tersebut dapat diasumsikan sebagai faktor yang sangat potensial berpengaruh dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan di

lapangan. Oleh karenanya penjelasan atas turunan penetapan dari variabel-variabel tersebut lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kejelasan/konsistensi tujuan.

Dalam konteks kejelasan/konsistensi tujuan, dapat dikatakan bahwa semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun menurut urutan kepentingannya bagi para pejabat pelaksana dan aktor-aktor lainnya, semakin besar pula kemungkinan bahwa *output* kebijakan dari badan-badan pelaksana, dan pada gilirannya perilaku kelompok-kelompok sasaran, akan sejalan dengan petunjuk-petunjuk tersebut. Sebagaimana Sabatier dan Mazmanian (Wahab, 2001) mengatakan bahwa tujuan-tujuan resmi yang dirumuskan dengan cermat dan disusun secara jelas sesuai dengan urutan kepentingan memainkan peranan yang amat penting sebagai alat bantu dalam mengevaluasi program, sebagai pedoman yang kongkrit bagi pejabat-pejabat pelaksana dan sebagai sumber dukungan bagi tujuan itu sendiri. Lebih jauh Sabatier dan Mazmanian (Wahab, 2001) mengatakan bahwa tujuan yang jelas dapat pula berperan sebagai sumber-sumber bagi para aktor/ pelaku yang terlibat, baik aktor-aktor yang berada di dalam lembaga-lembaga pelaksana maupun yang berada di luar lembaga-lembaga tersebut.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah peraturan yang akan diimplementasikan oleh lembaga-lembaga yang ada harus menunjukkan secara jelas bahwa ketentuan-ketentuan baru tersebut merupakan prioritas

utama dalam program-program yang dijalankan oleh lembaga-lembaga tersebut. Sebab, apabila tidak, bukan mustahil ketentuan-ketentuan baru tadi akan tertunda pelaksanaannya lantaran dianggap menempati urutan prioritas yang rendah atau malahan diabaikan sama sekali.

Kondisi tersebut memerlukan daya penentu atau daya dukung kebijakan dari struktur tujuan, yang tergantung pada beberapa faktor. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hoogerwerf (1985), yaitu ;

- a. Sifat kabur dan umum ataupun ketepatan dan keterperincian dari tujuan dan prioritas-prioritas yang dikhususkan. Bila ini bersifat sangat kabur maka akan mengakibatkan daya penentu/daya dukung kebijakan yang kecil. Dalam hal itu ada suatu kelonggaran yang luas bagi pengisian kebijakan dan pelaksanaan baik dalam sub tujuan maupun sarana, aktifitas dan waktu. Jika sebaliknya dirumuskan dengan jelas dan terperinci, maka akan dapat mengakibatkan suatu daya dukung kebijakan yang kuat.
- b. Kuasa politik dari penentu kebijakan. Jika ini kecil umpamanya karena pemerintah bersandar atas mayoritas kecil interen sangat terpecah-pecah, maka kemungkinannya untuk mengembangkan lebih lanjut tujuan-tujuan yang penting dan melaksanakannya akan kecil pula.
- c. Realisme tujuan-tujuan. Jika ini didasarkan atas taksiran yang tidak tepat dari kemungkinan merefleksikannya dan kemungkinannya dicapai

secara politis dan berdasarkan keuangan, maka daya dukung akan lebih kecil (minim).

Robert Linebery (dalam Wahab, 2001:89) menyatakan proses implementasi memiliki elemen-elemen penting, yaitu:

1. Kreasi dan staffing agen baru guna mengimplementasikan kebijakan baru atau menetapkan tanggung jawab implementasi kepada personel atau agen yang ada.
2. Menterjemahkan maksud dan tujuan legislatif ke dalam aturan-aturan operasional yang baik: perlu pengembangan panduan bagi para implementor.
3. Koordinasi sumber daya agen dan pembiayaan pada target group: pengembangan tanggung jawab divisi-divisi dalam agen dan antara agen dengan agen yang terkait.
4. Alokasi sumber daya guna kemampuan dampak kebijakan.

Berkenaan dengan itu, Anderson (Islamy:2000:76) mengungkapkan 4 (empat) aspek yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu: (1) Siapa yang dilibatkan dalam implementasi; (2) Hakikat proses administrasi; (3) Kepatuhan atas suatu kebijakan; dan (4) Efek atau dampak dari isi implementasi. Ke empat aspek sebagaimana disebutkan di atas merupakan serangkaian tata pelaksanaan yang tidak dapat dipisahkan dari proses implementasi kebijakan publik, sehingga setiap kebijakan yang telah ditetapkan dapat di implementasikan berdasarkan pada penentuan unit pelaksana. Sebagaimana menurut Anderson disebut *administrative unit* yaitu jajaran birokrasi publik dimulai dari level atas sampai pada level bawah. Untuk keperluan ini, Islamy (2000:87) menetapkan implementasi kebijakan ke dalam dua bentuk ,
yaitu:

1. *Self executing*, artinya bahwa dengan dirumuskan dan disahkan suatu kebijakan, maka kebijakan itu akan terimplementasikan dengan sendirinya.
2. *Non self executing*, artinya bahwa suatu kebijakan diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Akan tetapi, dalam kenyataannya setiap implementasi kebijakan tidaklah berjalan mulus dan bisa mengalami resiko kegagalan, karena dalam proses implementasi kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat dan pelaksana kebijakan dengan apa yang senyatanya ingin dicapai. Sebagaimana dikemukakan Andrew Dunsire (dalam Wahab, 2001:86) disebut *implementation gap*.

Sehubungan dengan itu, Parker (dalam Wahab, 2001:137) lebih jauh menyatakan implementasi kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Ketentuan ini menyangkut adanya dimensi-dimensi dalam implementasinya. Hal terpenting kedua adalah tindakan-tindakan yang diambil memenuhi keabsahan karena telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sebelum implementasi itu dilaksanakan.

Kebijakan yang tidak dapat terimplementasikan sebagaimana dikemukakan Hogwod dan Gun (dalam Wahab, 2001:89) disebabkan yaitu:

(1) kebijakan itu tidak dilaksanakan sesuai rencana; (2) mungkin pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan tidak mau bekerjasama; (3) bekerjanya tidak efisien; (4) hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup ditanggulangi. Sementara itu implementasi yang tidak berhasil karena (a) kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan dan (b) kebijakan tersebut tidak berhasil mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

Keberadaan implementasi kebijakan pada dasarnya adalah “jembatan” yang menghubungkan antara tindakan-tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky (dalam Agustino, 2006: 136) bahwa “implementasi/penerapan adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan”.

Lebih lanjut diungkapkan Ashari (2003:45), beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar implementasi kebijakan dapat efektif yaitu: “(1) Organisasi harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelayanan publik (memenuhi *performance*) serta (2) Isi pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan (*need*) dari masyarakat. Persyaratan ini berhubungan dengan utilitas fasilitasi pelayanan publik”.

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan yakni pendekatan *top down* dan *bottom up*. Masing-masing

pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

Implementasi kebijakan dalam pendekatan *top-down* dimana implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisasi dan dimulai dari aktor tingkat pusat dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top-down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administratur atau birokrat pada level bawahnya.

Jadi inti pendekatan *top-down* adalah sejauhmana tindakan para pelaksana (administratur dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat. Sedangkan *bottom-up* merupakan kebijakan yang berasal dari bawah (masyarakat) sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan.

Menurut Van Metter dan Carl Van Horn (dalam Agustino, 2006:141-142) terdapat 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu: Ukuran dan tujuan kebijakan; Sumberdaya; Karakteristik agen pelaksana; Sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana; Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; Lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Model pendekatan *top-down* yang

mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

Menurut Agustino (2006:157) beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan atau tidaknya suatu kebijakan publik, yaitu:

- a. Faktor penentu pemenuhan kebijakan:
 1. Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah.
 2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
 3. Adanya sanksi hukum
 4. Adanya kepentingan publik.
 5. Adanya kepentingan pribadi
 6. Masalah waktu
- b. Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan
 1. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada.
 2. Tidak adanya kepastian hukum.
 3. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi
 4. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum.

Schubungan dengan hal tersebut, terdapat banyak model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli sesuai dengan kerangka berpikir masing-masing. Model-model tersebut pada dasarnya adalah berkaitan dengan variabel-variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi, yang masing-masing variabel atau faktor tersebut saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Berikut ini hanya akan dikemukakan beberapa model dalam

Model pertama adalah model yang dikembangkan oleh George Edwards III (1980). Dalam pandangan Edwards III (dalam Subarsono, 2005:90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel atau faktor, yakni :

1. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target groups*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumber daya. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial sehingga implementasi tidak akan berjalan efektif.
3. Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
4. Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP), yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Berdasarkan pendapat George Edwards III di atas, implementasi penyaluran bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) dipengaruhi oleh faktor – faktor : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Keberhasilan implementasi kebijakan penyaluran bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target groups*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Sumberdaya implementasi penyaluran bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) dapat berupa sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial sehingga implementasi tidak akan berjalan efektif. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor kebijakan penyaluran bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD), seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan penyaluran bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP), yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Menurut Gitosudarmo dan Sudita (2000:1) "organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan". Menurut Siagian (1985:117) "sebagai alat administrasi dan manajemen organisasi dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut pandang yaitu: wadah dan proses". Sebagai wadah, organisasi merupakan tempat kegiatan-kegiatan administrasi dan management

dijalankan. Sedangkan sebagai proses, organisasi merupakan proses interaksi antara orang-orang dalam organisasi.

Menurut Schulze (Sutarto, 1993:23-24) "organisasi adalah pengembangan dari orang-orang, benda-benda, alat dan perlengkapan ruang kerja dan segala sesuatu yang bertalian dengannya yang dihimpun dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan". Jika dilihat dari definisi tersebut maka jelas bahwa administrasi dapat berjalan apabila benda-benda di dalamnya dapat melakukan suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Benda-benda dalam organisasi yang dimaksud adalah dapat berfungsi apabila orang-orang di dalamnya dapat melakukan kegiatan kerjasama dan kegiatan pengembangan suatu organisasi. Pengembangan organisasi merupakan suatu kegiatan keorganisasian dengan pola tertentu dalam hubungan tertentu di antara bagian prosesnya. Pengembangan organisasi bukan hanya perubahan keorganisasian yang direncanakan saja. Pandangan pengembangan organisasi pada saat ini dapat diartikan sebagai popularitas perubahan dalam mengukur prestasi yang optimal baik dari segi efisiensi dan efektifitas merupakan pengembangan dari suatu organisasi yang terstruktur.

Kinerja pemimpin secara efektif manajer harus dengan jelas mengetahui struktur organisasi. Suatu organisasi para staf memiliki fungsi yang berkaitan dengan bidang kerja yang sama dan merupakan suatu kesatuan/unit kerja. Efisiensi arus kerja tergantung dari keberhasilan memadukan kesatuan-kesatuan kerja/ unit-unit kerja yang terencana dalam suatu organisasi.

Pembagian kerja dan kombinasi tugas seyogyanya mengarahkan pada struktur bidang satuan-satuannya. Struktur organisasi juga mengatur antar- hubungan bagian-bagian dari komponen dan posisi dalam suatu organisasi. Struktur organisasi memfokuskan pembagian kerja secara spesifik dan mewujudkan bagaimana fungsi-fungsi ataupun kegiatan-kegiatan saling terkait, dalam beberapa hal juga menunjukkan tingkat-tingkat spesialisasi dari kegiatan kerja. Disamping itu juga menunjukkan hirarki dan kewenangan dan menunjukkan pula tata hubungan. Struktur organisasi juga merupakan suatu susunan formal dan mekanisme-mekanisme yang mana organisasi itu dikelola.

Organisasi menunjukkan kerangka dan susunan sebagai perwujudan hubungan-hubungan antar komponen-komponen pembagian, fungsi-fungsi kegiatan dan posisi-posisi yang menunjukkan tingkat spesialisasi kegiatan kerja. Struktur organisasi yang dibentuk tentunya struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat-syarat sehat dan efisien. Struktur organisasi yang sehat dapat menjalankan peranannya dengan tertib. Struktur organisasi efisien dalam menjalankan peranannya tersebut masing-masing satuan organisasi dapat mencapai perbandingan terbaik antara usaha dan hasil kerja. Agar dapat diperoleh suatu organisasi yang sehat dan efisien pada waktu membentuk harus memperhatikan azas-azas organisasi.

Menurut Gibson (1997:8) "azas-azas organisasi dapat berperan pada 2 (dua) macam yang pertama yaitu sebagai pedoman untuk membentuk struktur organisasi yang sehat dan efisien dalam peranannya, sedangkan yang kedua

sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan organisasi supaya dapat berjalan lancar”. Dengan demikian organisasi sebagai pedoman yang sejauh mungkin hendaknya dilaksanakan agar diperoleh suatu struktur organisasi yang baik dan aktifitas organisasi dapat berjalan dengan lancar.

Dengan adanya struktur dan perlindungan, satuan-satuan kerja akan melahirkan bentuk-bentuk organisasi. Menurut Sutarto (1993:5) bentuk-bentuk organisasi dapat dibedakan sebagai berikut: “(1) Bentuk organisasi lini, (2) Bentuk organisasi fungsional, (3) Bentuk organisasi lini dan staf, (4) Bentuk organisasi komisararis, dan (5) Bentuk organisasi matriks”. Sedangkan menurut Hasibuan (1996:63) “organisasi dapat dibedakan sebagai berikut : “(1) Organisasi lini dan staf, (2) Organisasi lini dan staf, (3) Organisasi fungsional, (4) Organisasi lini, fungsional dan staf, serta (5) Organisasi komite”.

Adapun ciri-ciri organisasi lini menurut Fayol (dalam Gibson, 1997:33) adalah sebagai berikut :

- a. Organisasi masih kecil.
- b. Jumlah karyawan masih sedikit.
- c. Pemilik biasanya menjadi pemimpin tertinggi.
- d. Hubungan kerja antara pimpinan dengan bawahan pada umumnya bersifat langsung.
- e. Tingkat spesialisasi yang dibutuhkan untuk melakukan tugas pokok dan fungsi organisasi masih rendah.
- f. Saling mengenal.
- g. Tujuan yang dicapai masih relatif sederhana.
- h. Susunan organisasi tidak rumit.
- i. Alat yang dibutuhkan masih sederhana.

Konsep keefektifan suatu organisasi tidak terlepas dari suatu siklus yang mencerminkan suatu makna, proses dan keluaran. Konsep itu harus

mencerminkan hubungan timbal balik antara organisasi dengan lingkungan sekelilingnya. Dengan demikian menurut Gibson (1995:32) “keefektifan organisasi adalah seluruh konsep yang menyeluruh yang mencakup seluruh konsep komponen”. Dalam suatu organisasi apabila dapat berjalan dengan efektif, maka ciri-ciri organisasi yang baik menurut Hasibuan (1996:31) antara lain :

- a. Tujuan organisasi itu jelas dan realistis.
- b. pembagian kerja dan hubungan kerja antara unit-unit, sub sistem-sub sistem atau bagian-bagian harus baik dan jelas.
- c. Organisasi harus menjadi alat dan wadah yang efektif dalam mencapai tujuan.
- d. Tipe organisasi dan strukturnya harus sesuai dengan kebutuhan.
- e. Unit-unit kerjanya ditetapkan berdasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan.
- f. Kedudukan setiap jabatan harus jelas dan tidak ada tumpang tindih pekerjaan.
- g. Rentang kendali setiap bagian harus berdasarkan volume pekerjaan dan tidak boleh terlalu banyak.
- h. Sumber perintah dan tanggung jawab harus jelas melalui jarak yang terpendek.
- i. Jenis wewenang yang dimiliki setiap pejabat harus jelas.
- j. Mis manajemen penempatan karyawan tidak ada.
- k. Hubungan antara bagian dengan bagian lainnya jelas dan serasi.
- l. Pendelegasian wewenang harus berdasarkan job diskripsi karyawan.
- m. Deferensiasi, ordinasi, integrasi dan sinkronisasi harus baik.
- n. Organisasi harus luwes dan fleksibel.
- o. Organisasi harus mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Keefektifan suatu organisasi merupakan kumpulan dari individu dan kelompok sehingga keefektifan organisasi pada dasarnya merupakan fungsi dari keefektifan dari individu dan kelompok, yang artinya bahwa organisasi dapat memperoleh tingkat prestasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan jumlah prestasi masing-masing bagian yang ada dalam organisasi. Yang paling

mendasar dalam tingkat keefektifan adalah keefektifan individual yang menekankan pada pelaksanaan tugas pekerjaan atau anggota dari organisasi. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan merupakan bagian dari pekerjaan atau posisi dalam organisasi menafsir secara rutin tentang keefektifan individu melalui proses evaluasi

Sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam kelompok tersebut yaitu keefektifan kelompok. Model keefektifan organisasi berdasarkan dimensi waktu memungkinkan kita memahami pekerjaan manajer dalam organisasi. Tugas dasar manajer yaitu mengidentifikasi dan mempengaruhi sebab-sebab keefektifan individu, kelompok dan organisasi dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Menurut Hasibuan (1996:1) “model dimensi waktu tingkat keefektifan secara tegas dinyatakan dalam ukuran waktu :

1. Jangka pendek: kriteria untuk menunjukkan hasil tindakan yang mencakup waktu satu tahun atau lebih.
2. Jangka menengah:kriteria yang diterapkan apabila menilai keefektifan seseorang, kelompok atau organisasi dalam jangka waktu yang lebih lama minimal 5 tahun.
3. Jangka panjang:kriteria untuk menilai waktu yang akan datang yang tidak terbatas.

Apabila jangka waktu yang telah ditentukan untuk mengukur keefektifan organisasi, maka organisasi dapat mempengaruhi kinerja penggerak organisasi atau prestasi. Efektifitas bagi sebagian besar organisasi merupakan urusan yang memaksimalkan tujuan dan memaksimalkan pencapaian tujuan. Pendapat Hasibuan ini hampir sama dengan Gibson yang menyatakan bahwa model dimensi waktu juga dapat sebagai ukuran kriteria

keefektifan. Selain itu dalam mengukur keefektifan, ada 5 (lima) kriteria keefektifan menurut Gibson (1995:36) yaitu :

- a. Produksi, mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan kualitas keluaran yang dibutuhkan lingkungan. Konsep ini meniadakan setiap pertimbangan efisiensi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan, pangsa pasar.
- b. Efisiensi, didefinisikan sebagai perbandingan keluaran terhadap masukan. Kriteria jangka pendek ini memfokuskan perhatian atas siklus keseluruhan dari masukan - proses - keluaran, dengan menekankan pada elemen masukan dan proses.
- c. Kepuasan, ide organisasi sebagai suatu sistem sosial menuntut agar diperhatikan beberapa pertimbangan yang bermanfaat bagi para pesertanya, termasuk para pelanggan dan rekanan. Kepuasan dan moral adalah ukuran yang serupa untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi memenuhi kebutuhan karyawannya. Dalam hal ini kita menggunakan kepuasan untuk menunjukkan kriteria ini.
- d. Keadaptasian, ialah tingkat di mana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal. Keadaptasian dalam hal ini mengacu pada kemampuan manajemen merasakan perlunya perubahan dalam lingkungan, termasuk dalam tubuh organisasi itu sendiri.
- e. Pengembangan, kriteria ini mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitas yang meghadapai tuntutan lingkungan. Suatu organisasi harus melakukan berbagai upaya untuk memperbesar kesempatan kelangsungan hidup jangka panjangnya.

Sekolah sebagai suatu organisasi perlu diatur dengan baik guna mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk itu diperlukan suatu kepemimpinan kepala sekolah yang baik., karena kepala sekolah sebagai *top leader* di lingkungan sekolah memegang peranan penting sebagaimana pendapat Wahjosumidjo (2003:40) bahwa: “(a) seorang pemimpin berfungsi sebagai orang yang mampu menciptakan perubahan secara efektif di dalam penampilan kelompok, dan (b) seorang pemimpin berfungsi menggerakkan orang lain

sehingga secara sadar orang lain tersebut mau melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin”

Sekolah merupakan salah satu tempat bagi para siswa untuk menuntut ilmu. Dan melihat kenyatannya hingga sekarang sekolah masih dipercaya oleh sebagian besar anggota masyarakat sebagai salah satu tempat untuk belajar, berlatih kecakapan, menyerap pendidikan atau tempat proses mendewasakan anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988:126) bahwa: “sekolah merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran”. Sedangkan menurut Darmawan (1995:23) bahwa:

Sekolah merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah. Kepala Sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah. Jumlah wakil kepala sekolah di setiap sekolah berbeda, tergantung dengan kebutuhannya. Bangunan sekolah disusun meninggi untuk memanfaatkan tanah yang tersedia dan dapat diisi dengan fasilitas lain.

Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik dalam proses belajar mengajar sebagaimana pendapat Wahjosumidjo (2003:134) bahwa:

Sekolah sebagai sebuah organisasi, dimana menjadi tempat untuk mengajar dan belajar serta tempat untuk menerima dan memberi pelajaran, terdapat orang atau sekelompok orang yang melakukan hubungan kerja sama yaitu kepala sekolah, kelompok guru dan tenaga fungsional yang lain, kelompok tenaga administrasi/staf, kelompok siswa atau peserta didik, dan kelompok orang tua siswa.

Dari pengertian tersebut, menurut Wahjosumidjo (2003:134-135) hubungan kerja mereka dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yaitu:

1. Seorang atau mereka yang bertanggungjawab atau diberi tugas untuk memimpin, dalam hal ini adalah kepala sekolah;
2. Sekelompok orang yang berkepentingan untuk mengajar atau memberikan pelajaran atau tugas-tugas pendidikan yang lain, dalam hal ini mereka adalah para guru atau tenaga fungsional yang lain;
3. Sekelompok atau orang tua siswa yang bergabung dalam suatu organisasi di sekolah yang diharapkan membantu kepala sekolah dalam mendukung tercapainya proses belajar mengajar;
4. Kelompok para siswa atau peserta didik ialah para siswa yang dalam proses belajar mengajar berfungsi sebagai kelompok yang menerima pelajaran.

Selain itu menurut Wahjosumidjo (2003:135) bahwa: "sekolah merupakan tempat bergabung atau kumpulan orang-orang sebagai sumber daya manusia dalam satuan kerja masing-masing mempunyai hubungan atau terikat dalam kerjasama sama untuk mencapai tujuan". Hubungan kerjasama dalam kehidupan sekolah dapat dibedakan antara hubungan kekuasaan dan hubungan yang bersifat koordinasi. Hubungan kekuasaan terjadi antara kepala sekolah sebagai orang yang bertanggungjawab untuk memimpin dengan kelompok-kelompok guru, tenaga administrasi, orang tua siswa dan para guru siswa, kelompok yang dipimpin. Sedangkan hubungan koordinatif adalah hubungan antar sesama guru, sesama staf, sesama siswa dan sesama anggota kelompok orang tua siswa.

Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin di sekolah maka harus memiliki kepedulian dengan kondisi siswa atau anak didik. Salah satu kondisi

siswa adalah kekurangmampuan di bidang keuangan. Untuk itu perlu adanya solusi agar siswa tidak putus di tengah jalan. Salah satu solusinya adalah pemberian bea siswa kepada siswa miskin.

Kemudian Van Meter dan Van Horn yang disebut sebagai *A Model of Policy Implementation Process* menyatakan ada 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

1. Standar dan Sasaran kebijakan; Harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.
2. Sumberdaya; Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non human resources*).
3. Komunikasi dan Hubungan Antar Organisasi
Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
4. Karakteristik Agen Pelaksana, yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor. Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yakni : a) respons implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Model selanjutnya adalah model implementasi yang dikembangkan oleh

Merilee S. Grindle (1980). Menurut Grindle (dalam Subarsono, 2005:93) :

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni : isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan mencakup :

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan (*interest affected*).
2. Jenis manfaat yang diterima oleh *target groups* (*type of benefits*).
3. Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan (*extent of change envisioned*).
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat (*site of decision making*).
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci (*program implementor*); dan
6. Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai (*resources committed*).

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup :

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan (*power, interest, and strategies of actors involves*).
2. Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa (*Institution and regime characteristics*); dan
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran (*compliance and responsiveness*).

Kemudian Warwick (dalam Tachjan, 2006:51) mengemukakan bahwa “pada tahap implementasi, berbagai kekuatan akan berpengaruh baik faktor yang mendorong atau memperlancar, maupun kekuatan yang menghambat atau memacetkan pelaksanaan program”. Menurutnya, terdapat dua kategori faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu :

1. Faktor-faktor pendorong (*facilitating conditions*), yang terdiri dari : a) *commitment of political leaders*; b) *organizational capacity*; c) *the commitment of implementations*; d) dukungan dari kelompok kepentingan.
2. Faktor-faktor penghambat (*impeding condition*), yang terdiri dari : a) banyaknya pemain (*actors*); b) terdapat komitmen atau loyalitas ganda; c) kerumitan yang melekat pada kegiatan itu sendiri; d) jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak; e) waktu dan perubahan kepemimpinan.

Selanjutnya dalam kaitan dengan kebijakan, faktor pendukung atau sebab-sebab anggota masyarakat melaksanakan suatu kebijakan menurut Anderson (dalam Wahab, 1997:114) adalah :

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah.
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan.
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan-kebijakan kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam pengimplementasiannya.

Selain faktor-faktor pendukung di atas, terdapat juga beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan publik. Masih menurut Anderson (dalam Wahab, 1997:76) mengemukakan faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan publik atau sebab-sebab anggota masyarakat menolak suatu kebijakan yaitu :

1. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.
2. Karena keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok atau perkumpulan, dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau keinginan pemerintah.
3. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara para anggota, yang cenderung bertindak dengan menipu atau melawan hukum.
4. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan ukuran kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang terhadap hukum atau kebijakan publik.
5. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam karena kebijakan tersebut bertentangan dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Implementasi penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar tidak bisa lepas dari peran Kepala Sekolah. Manajemen pendidikan berbasis sekolah memberikan otonomi yang luas kepada kepala sekolah, sehingga kepala sekolah harus dapat mengambil keputusan secara lebih otonom dengan menggunakan gaya kepemimpinan yang partisipatif. Dalam pengambilan keputusan yang partisipatif tersebut kepala sekolah perlu melibatkan semua komponen komunitas sekolah seperti guru, siswa, kepala sekolah, pegawai, orangtua, siswa, dan masyarakat secara fungsional. Artinya unsur-unsur komunitas sekolah tersebut diberi peluang dan diajak untuk memikirkan kemajuan sekolah dan peningkatan mutu sekolah melalui kontribusi masing-masing sesuai dengan kapasitasnya.

Dengan demikian peran kepemimpinan Kepala Sekolah sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Menurut Karyadi (1981:69) peranan seorang pemimpin dalam hal ini adalah Kepala Sekolah salah satunya adalah harus menjalankan peranan sesuai rumusan Ki Hajar Dewantara tentang kependidikan atau kepemimpinan yaitu, "*Ing ngarso sung tulodo* (di depan memberi teladan), *Ing madyo mangun karso* (di tengah membangun kemauan) dan *Tut wuri handayani* (di belakang selalu memberikan dorongan)".

Rumusan menurut Ki Hajar Dewantara tersebut, menurut Suwondo (2003:25) Kepala Sekolah berfungsi sebagai Pimpinan, Administrator dan Supervisor, sebagaimana yang dijelaskannya sebagai berikut:

Dalam hal Kepala Sekolah selaku Pimpinan mempunyai tugas antara lain, menyusun perencanaan; mengorganisasikan kegiatan; mengarahkan kegiatan; mengkoordinasikan kegiatan; melaksanakan pengawasan; melakukan evaluasi terhadap kegiatan; menentukan kebijaksanaan; mengadakan rapat; mengambil keputusan; mengatur proses belajar mengajar; mengatur administrasi kantor, siswa, pegawai, perlengkapan, keuangan/ Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), mengatur Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS); serta mengatur hubungan Sekolah dengan masyarakat dan dunia usaha. Kepala Sekolah selaku Administrator bertugas menyelenggarakan administrasi: perencanaan; pengorganisasian; pengarahan; pengkoordinasian; pengawasan; kurikulum; kesiswaan; kantor; kepegawaian; perlengkapan; keuangan; perpustakaan; laboratorium; serta ruang keterampilan/kesenian. Kepala Sekolah selaku Supervisor bertugas menyelenggarakan Supervisi mengenai, Kegiatan belajar mengajar; Kegiatan bimbingan dan penyuluhan/bimbingan karir; Kegiatan ekstrakurikuler; Kegiatan ketatausahaan; serta Kegiatan kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha.

Fungsi dari kepemimpinan secara garis besar yaitu mempengaruhi dan menggerakkan orang lain dalam suatu organisasi agar mau melakukan apa yang dikehendaki seorang pemimpin guna tercapainya tujuan. Sedangkan syarat seorang pemimpin yaitu harus memiliki kemampuan dasar berupa *technical skills, human skill, dan conceptual skill*, serta pengetahuan dan keterampilan profesional. Dengan terpenuhinya syarat sebagai seorang pemimpin, maka seorang kepala sekolah dituntut untuk dapat memberi keteladanan dalam pelaksanaan tugas, menyusun administrasi dan program sekolah, menentukan anggaran belanja sekolah, dan pembagian pelaksanaan

tugas. Sementara itu empat pola perilaku kepemimpinan yang lazim disebut gaya kepemimpinan meliputi perilaku instruktif, konsultatif, dan partisipatif, dan delegatif sebagaimana penjelasan di atas.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak yang berasal dari keluarga miskin, maka pemerintah telah melaksanakan Penyaluran beasiswa bagi siswa miskin jenjang sekolah dasar yang dilaksanakan oleh Depdiknas, Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota dan terhadap Kepala Sekolah.

Kepala Sekolah sebagai pemimpin di lingkungan sekolah mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap peningkatan dan kemajuan sekolah. Dengan demikian kepemimpinan Kepala Sekolah merupakan wujud dari peran Kepala Sekolah sebagai seorang pemimpin (*leader*). Kepemimpinan adalah bagian penting manajemen dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi. Menurut Handoko (1999:234) bahwa: "kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran".

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang menentukan kesuksesan penyaluran beasiswa. Sebagaimana dikemukakan oleh Nurkolis (2005:152) setidaknya ada empat alasan kenapa diperlukan figur pemimpin, yaitu; "(1) banyak orang memerlukan figur pemimpin, (2) dalam beberapa situasi seorang pemimpin perlu tampil mewakili kelompoknya, (3) sebagai tempat pengambilalihan resiko bila terjadi tekanan terhadap kelompoknya, dan (4) sebagai tempat untuk meletakkan kekuasaan".

Betapa berat dan mulia peranan seorang kepala sekolah sebagai pendidik (*educator*) apabila dikaitkan dengan berbagai tanggungjawab. Menurut Wahjosumidjo (2003:123), sebagai seorang pendidik (*educator*) kepala sekolah harus mampu menanamkan, memajukan dan meningkatkan paling tidak empat macam nilai, yaitu:

- a. Mental, hal-hal yang berkaitan dengan sikap batin dan watak manusia;
- b. Moral, hal-hal yang berkaitan dengan ajaran baik buruk mengenai perbuatan, sikap dan kewajiban atau moral yang diartikan sebagai akhlak, budi pekerti dan kesusilaan;
- c. Fisik, hal-hal yang berkaitan dengan kondisi jasmani atau badan, kesehatan dan penampilan manusia secara lahiriah;
- d. Artistik, hal-hal yang berkaitan kepekaan manusia terhadap seni dan keindahan.

Terakhir yang perlu diperhatikan oleh setiap kepala sekolah terhadap peranannya sebagai pendidik (*educator*), menurut Wahjosumidjo (2003:124) mencakup dua hal pokok, yaitu: "sasaran atau kepada siapa perilaku sebagai pendidik itu diarahkan. Sedang yang kedua, yaitu bagaimana peranan sebagai pendidik itu dilaksanakan".

Kepala Sekolah sebagai pemimpin di sekolah bertugas menyelenggarakan proses belajar mengajar di sekolah dengan tertib dan lancar. Untuk itu, Kepala Sekolah harus mempunyai kemampuan dalam menyelenggarakan administrasi pendidikan di sekolah. Menurut Gunawan (1996:1) bahwa: "administrasi pendidikan adalah semua usaha untuk mendayagunakan secara tepat guna dan berhasil guna sumber-sumber material dan personal yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan".

Menurut Gunawan (1996:3) terdapat tiga fungsi pokok, Kepala Sekolah sebagai administrator yaitu:

1. Kepala Sekolah membuat perencanaan kegiatan-kegiatan strategis.
2. Kepala Sekolah mengusahakan untuk pelaksanaannya secara sungguh-sungguh dengan cara-cara yang terarah demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, disertai pembinaan demi peningkatan pendidikan.
3. Kepala Sekolah memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia secara efektif dan efisien dalam kegiatan belajar mengajar.

Kepala Sekolah sebagai administrator juga melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengkoordinasian. Kepala Sekolah merencanakan pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Kepala Sekolah mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Kepala Sekolah memberikan pengarahan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar serta Kepala Sekolah mengkoordinasikan semua proses belajar mengajar kepada setiap pelaksana kegiatan belajar mengajar.

Berbagai aspek yang harus dikuasai Kepala Sekolah adalah sebagai berikut: Aspek kepribadian yang kuat, Aspek kemampuan mengenal anak buah, serta Aspek pemahaman terhadap visi dan misi Sekolah. Dikatakan Mulyasa (2004:98) dalam hal kepemimpinan, Kepala SD berfungsi baik sebagai "pendidik (*educator*), pengelola (*manager*), sebagai pengurus (*administrator*), sebagai penyelia (*supervisor*) maupun sebagai penggerak (*motivator*)".

Dari pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa disamping memiliki kemampuan, Kepala Sekolah sebagai pemimpin juga harus memiliki sifat-sifat

kepemimpinan. Menurut Ordway dan Tead (dalam Karjadi, 1981:3) menyatakan bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki sifat-sifat: "Energi jasmani dan rohani; Semangat untuk mencapai tujuan; Anthusiasme (kegairahan); Ramah tamah dan penuh perasaan; Integritas (kejujuran, ketulusan); Kecakapan teknis; Mudah menentukan keputusan; Cerdas; Kecakapan mengajar; Keyakinan".

1. Sebagai *Educator*

Sebagai pendidik (*educator*), Kepala SD mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap guru dan TU agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagai guru dan TU agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagai guru dan TU profesional. Untuk itu berbagai aspek yang harus dikuasai oleh Kepala SD adalah sebagai berikut, Aspek prestasi sebagai guru, Aspek kemampuan membimbing guru. Aspek kemampuan membimbing karyawan (TU, Laboran, dan sebagainya), Aspek kemampuan membimbing siswa serta Aspek kemampuan mengembangkan staf.

2. Sebagai *Manager*

Sebagai pengelola/manajer, Kepala Sekolah dapat mengamankan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya, menggerakkan semua guru dan TU untuk dapat bekerja optimal. Kepala Sekolah juga berkewajiban melakukan pemantauan apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Menurut Mulyasa (2004:101)

Berbagai aspek yang harus dikuasai oleh Kepala SD adalah sebagai berikut: “Aspek kemampuan menyusun program, Aspek kemampuan menyusun organisasi/kepegawaian di Sekolah, Aspek kemampuan menggerakkan staf serta Aspek kemampuan mengoptimalkan Sumber Daya Sekolah”.

3. Sebagai *Administrator*

Sebagai seorang administrator, Kepala Sekolah melakukan fungsi-fungsi merancang perencanaan kegiatan sekolah, menggerakkan kegiatan melalui pemberian dorongan kepada guru dan staf, melakukan komunikasi kepada instansi lain, demi tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Dalam hubungan tersebut menurut Menurut Mulyasa (2004:105) berbagai aspek yang harus dikuasai Kepala SD adalah sebagai berikut: “Aspek kemampuan mengelola administrasi KBM dan BK, Aspek kemampuan mengelola administrasi Kesiswaan, Aspek kemampuan mengelola administrasi Ketenagaan Aspek kemampuan mengelola administrasi Keuangan, Aspek kemampuan mengelola administrasi Sarana/Prasarana, serta Aspek kemampuan mengelola administrasi Persuratan”.

4. Sebagai *Supervisor*

Sebagai supervisor, seorang Kepala Sekolah harus melakukan pengawasan dan pembinaan kepada guru, khususnya berkaitan dengan kegiatan belajar dan mengajar di kelas, agar dapat berjalan sesuai dengan rencana, dan tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berbagai aspek

yang harus dikuasai Kepala SD sebagai supervisor menurut Menurut Mulyasa (2004:109) adalah sebagai berikut : “Aspek kemampuan menyusun program supervisi pendidikan, Aspek kemampuan melaksanakan supervisi pendidikan dan Aspek kemampuan memanfaatkan hasil Supervisi”.

5. Sebagai *Leader*

Sebagai seorang pemimpin (*leader*), Kepala Sekolah harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan mengerakkan semua personil Sekolah agar dapat melakukan tugas secara efektif. Sebagai pemimpin, Kepala Sekolah juga harus berpikir menerobos batas, artinya melahirkan pemikiran-pemikiran kreatif untuk membawa sekolah kepada kondisi yang lebih maju. Pemikiran seorang pemimpin tidak sebatas pada rencana dan aturan-aturan yang telah ada, tetapi melompat kepada perubahan-perubahan kedepan, yang kadang-kadang belum dipikirkan oleh personil Sekolah lainnya.

6. Sebagai *Inovator*

Sebagai pembaharu (*inovator*), Kepala Sekolah harus berpikir dinamis, peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Sebagai pembaharu, Kepala Sekolah harus adaptif terhadap perubahan yang terjadi, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut. Dimungkinkan Kepala Sekolah menjadi pemimpin dalam pembaharuan tersebut. Berbagai aspek yang harus dikuasai Kepala SD menurut Menurut

Mulyasa (2004:113) adalah sebagai berikut: "Aspek kemampuan mencari/ menemukan gagasan baru dan Aspek kemampuan melakukan pembaharuan di Sekolah".

7. Sebagai *Motivator*

Sebagai penggerak (*motivator*), Kepala Sekolah memiliki teknik yang cukup untuk dapat mengerakkan dan memberikan motivasi kepada para guru dan staf, agar mereka dapat dan mampu melakukan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan Sekolah secara efektif dan efisien. Berbagai aspek yang harus dikuasai Kepala SD adalah sebagai berikut: Aspek kemampuan mengatur lingkungan kerja (fisik), Aspek kemampuan mengatur suasana kerja (non fisik), serta Aspek kemampuan menerapkan prinsip penghargaan dan hukum.

Selanjutnya mengenai pengertian siswa telah ditegaskan dalam Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;

- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Selain hak tersebut, berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap peserta didik berkewajiban :

- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

3. Program Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD)

Pengertian beasiswa menurut Wahjosumidjo (2003:142) adalah "pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh". Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988:121), "beasiswa adalah tunjangan yg diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar". Pemberian beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian cuma-cuma ataupun pemberian dengan ikatan kerja (biasa disebut ikatan dinas) setelah selesainya pendidikan. Lama ikatan dinas ini berbeda-beda, tergantung pada lembaga yang memberikan beasiswa tersebut. Dengan pemberian

beasiswa ini, diharapkan tidak ada lagi siswa miskin yang putus sekolah. Juga meringankan beban orangtua di masa sulit seperti ini.

Peningkatan harga BBM diakibatkan oleh ditariknya sebagian subsidi pemerintah, sebagai akibat naiknya harga BBM tersebut, diperkirakan akan menambah beban masyarakat terutama masyarakat miskin. Dalam bidang pendidikan, para orang tua akan mengalami kesulitan dalam membiayai anak dalam menempuh pendidikan. Terhadap kemiskinan itu sendiri cukup banyak konsep yang dijumpai tentang cara pengukurannya, diantaranya dapat dilihat secara absolut dan secara relatif. Soetomo (dalam Ridwan, 2003: 26) mendefinisikan kemiskinan secara absolut maksudnya “tingkat kemiskinan dapat dikatakan bahwa mereka yang taraf hidupnya dibawah standar yang ditentukan tersebut dikatakan miskin”, sedangkan konsep secara relatif relevan digunakan dalam masyarakat yang semakin terbuka dan berkembang secara relatif menurut Soetomo (dalam Ridwan, 2003: 26), yaitu : “Kemiskinan tidak semata-mata diukur dengan menggunakan standar yang baku, melainkan juga dilihat dari seberapa jauh peningkatan taraf hidup lapisan bawah telah terjadi dibandingkan dengan lapisan masyarakat tersebut”.

Dalam rangka menghindari menurunnya kualitas pendidikan anak yang berasal dari keluarga miskin tersebut, pemerintah perlu melakukan serangkaian tindakan serta upaya membantu masyarakat khususnya keluarga yang kurang mampu, karena kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah dan negara. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1, yang

dinyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Sesuai arah kebijakan pembangunan sosial dan budaya maka salah satunya adalah meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin dan anak-anak terlantar serta kelompok rentan sosial.

Untuk melaksanakan dan menentukan jumlah penerima Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di setiap sekolah, maka dalam pelaksanaan dilakukan dalam beberapa tahap atau langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (2011: 5-7) yaitu:

Langkah 1: Tim Pusat menentukan alokasi jumlah siswa penerima BSM-SD untuk masing-masing propinsi.

Langkah 2: Tim Propinsi menentukan alokasi jumlah siswa penerima BSM-SD untuk setiap kabupaten/kota. Penetapan alokasi didasarkan pada indikator :

- a. Jumlah Siswa Miskin;
- b. Kondisi masyarakat yang tidak mampu/miskin;
- c. Letak geografis; dan
- d. Kemudahan koordinasi.
- e. Prinsip keadilan

Langkah 3: Tim Kabupaten/Kota menetapkan sekolah calon penerima BSM-SD. Penetapan ini didasarkan pada jumlah siswa miskin yang ada di masing-masing sekolah. Untuk keperluan tersebut, Tim Kabupaten/Kota meminta seluruh sekolah yang berhak menerima BSM-SD untuk mengirimkan daftar siswa miskin yang akan diusulkan memperoleh beasiswa (Format F), usulan dari wali kelas (Format B), surat keterangan keadaan orang tua tidak mampu/miskin (Format C), dan data calon penerima BSM-SD (Format D).

Langkah 4: Tim Kabupaten/Kota melakukan penetapan alokasi BSM-SD di tiap sekolah. Jika alokasi BSM-SD yang diterima kabupaten/kota mencukupi untuk seluruh siswa miskin yang diusulkan oleh sekolah, maka seluruh siswa yang diusulkan otomatis menerima BSM-SD. Bila jumlah usulan dari

sekolah melebihi alokasi kabupaten/kota, maka Tim Kabupaten/Kota menetapkan alokasi tiap sekolah dengan menggunakan mempertimbangkan tingkat kemiskinan sekolah (Format I)

Indikator yang dapat digunakan untuk menetapkan alokasi BSM-SD tiap sekolah antara lain:

- a. jumlah siswa di sekolah
- b. jumlah siswa dari keluarga miskin di sekolah tersebut,
- c. jarak sekolah ke ibukota ke kabupaten/kota, atau
- d. indikator kota lainnya (geografis, mata pencaharian, budaya, dll).

Disarankan Tim Kabupaten/Kota melakukan verifikasi keakuratan data usulan penerima BSM-SD yang dibuat oleh kepala sekolah.

Langkah 5: Tim Kabupaten/Kota menerbitkan SK alokasi tiap sekolah penerima BSM-SD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan (Format F)

Langkah 6: Surat Keputusan Penetapan Alokasi di tiap Sekolah dikirim ke Pengelola dana Dekonsentrasi Provinsi, Lembaga Penyalur dan ke sekolah.

Langkah 7: Sekolah yang telah menerima alokasi penerima BSM-SD dari Tim Kabupaten/Kota harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepala Sekolah bersama dengan wali kelas menentukan calon siswa penerima BSM-SD.

Kriteria penentuannya adalah:

1. Siswa berasal dari keluarga miskin
2. Pada tahun anggaran 2012 masih berstatus siswa SD
3. Siswa kelas I, II, III, IV, V yang berhak menerima beasiswa dan dibuktikan dengan rapor siswa
4. Memiliki tingkat kehadiran 75 % di sekolah
5. Memiliki kepribadian terpuji
 - a. Rajin dan disiplin
 - b. Taat pada peraturan dan tata tertib sekolah
 - c. Berperilaku santun dan baik kepada orang lain
 - d. Tidak merokok atau menggunakan narkoba

- b. Hasil penetapan siswa penerima BSM-SD tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan kepala sekolah, dan di pasang pada papan pengumuman sekolah (Format F).

Dari tahapan penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD)

dengan menyusun daftar sekolah yang akan menerima beasiswa. Setelah itu Dinas Pendidikan Kabupaten akan membuat jatah (*quota*) bagi tiap-tiap sekolah. Ini dimaksudkan agar setiap sekolah mendapatkan beasiswa sehingga penerima beasiswa tidak menumpuk pada satu sekolah tetapi bisa merata meskipun belum semua siswa miskin dapat menerima beasiswa karena terbatasnya anggaran.

Tujuan penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD), agar murid ditingkat pendidikan dasar yang berasal dari keluarga kurang mampu, dapat membiayai keperluan sekolahnya akibat kesulitan ekonomi sebagai dampak dari krisis. Kemudian murid mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk terus sekolah dan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi atau kejenjang tingkat sekolah lanjutan pertama. Dengan demikian penyaluran beasiswa bagi siswa miskin jenjang sekolah dasar adalah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan terutama untuk membantu murid dari keluarga kurang mampu.

Persyaratan penerima penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar Bidang Pendidikan Dasar atau Menengah (2011: 6) yaitu:

- a. Persyaratan / kriteria murid penerima Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD)
 1. Siswa berasal dari keluarga miskin
 2. Pada tahun anggaran 2012 masih berstatus siswa SD
 3. Siswa kelas I, II, III, IV, V yang berhak menerima beasiswa dan dibuktikan dengan rapor siswa
 4. Memiliki tingkat kehadiran 75 % di sekolah
 5. Memiliki kepribadian terpuji

- a. Rajin dan disiplin
- b. Taat pada peraturan dan tata tertib sekolah
- c. Berperilaku santun dan baik kepada orang lain
- d. Tidak merokok atau menggunakan narkoba

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat kita katakan bahwa kriteria penerima atau sasaran program penyaluran Beasiswa Sekolah Dasar Bidang Pendidikan Dasar adalah murid dari keluarga kurang mampu atau tidak mampu secara ekonomi, Terancam putus sekolah atau baru putus sekolah pada tahun sebelumnya karena kesulitan ekonomi.

Cara pengambilan dana penyaluran beasiswa bagi siswa miskin jenjang sekolah dasar, berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran beasiswa bagi siswa miskin jenjang sekolah dasar Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (2011: 10-13) adalah sebagai berikut:

- a. Pengambilan Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) dilakukan di Kantor Pos yang ditunjuk sebesar dana yang disalurkan secara utuh, tanpa potongan.
- b. Pengambilan Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) dilakukan sekaligus dengan menanda tangani bukti penerimaan yang disediakan oleh Kantor Pos.
- c. Pengambilan Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar dapat dilakukan secara langsung oleh murid atau secara kolektif oleh Kepala Sekolah.
- d. Pengambilan Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) oleh murid dengan menunjukkan tanda pengenal murid atau SK Penerima Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD).
- e. Pengambilan Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) secara kolektif oleh Kepala Sekolah menggunakan surat kuasa selektif tanpa meterai, diketahui oleh Ketua Komite Sekolah.

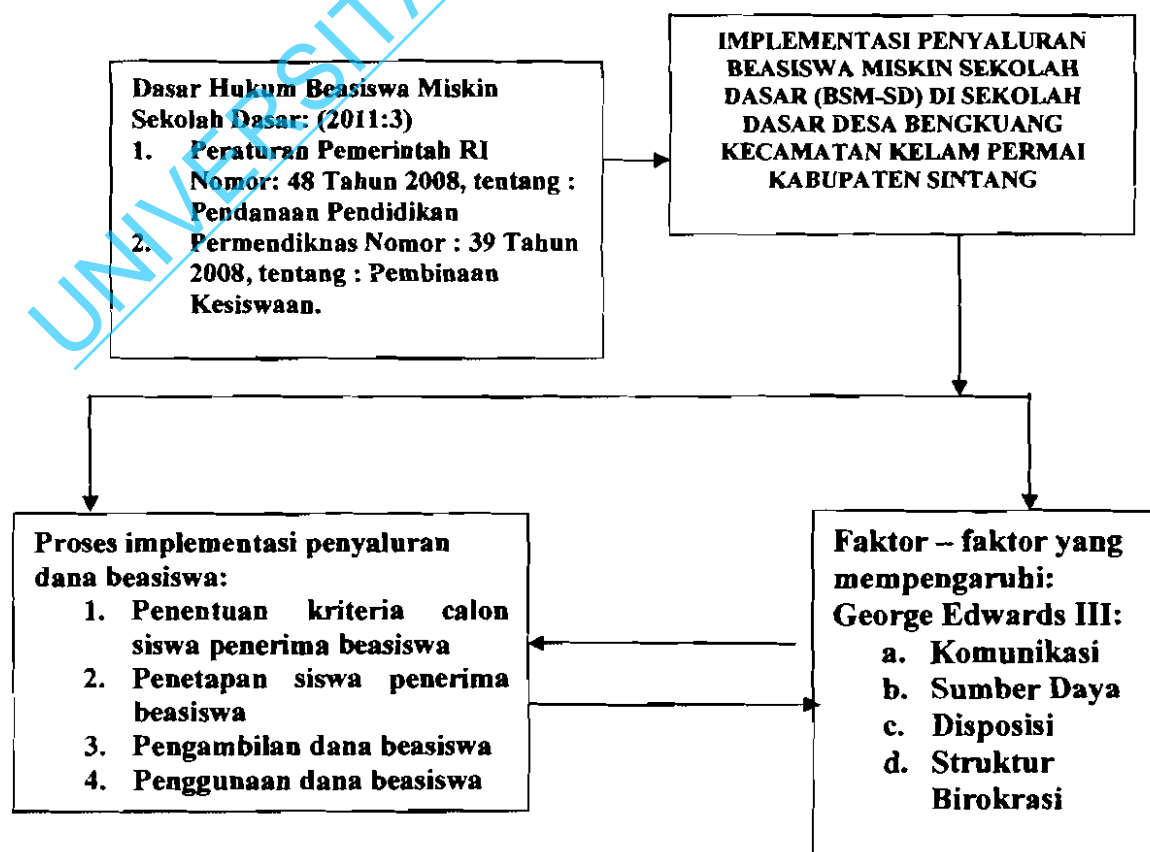
Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa pengambilan dana penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) harus berdasarkan

pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga Kepala Sekolah dan Komite Sekolah harus ada kerja sama untuk mengambil dana Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar di Kantor Pos setempat dan diharapkan mampu disalurkan sesuai dengan petunjuk yang berlaku.

C. Kerangka Pikir Alur Penelitian

Memperhatikan uraian – uraian teoritis yang dikemukakan sebelumnya, maka Kerangka Pikir Alur Penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Skematika Kerangka Pikir Alur Penelitian



Keterangan: Hasil Penelitian Penulis, 2013.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian deskriptif ini, penulis ingin mendeskripsikan tentang pelaksanaan penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD). Selain itu penulis juga akan mendeskripsikan dan menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar di di SDN Nomor 04 Bengkuang.

B. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh pihak – pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD). Sedangkan sampel penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang
2. Kepala Sekolah
3. Orang Tua Siswa
4. Komite Sekolah
5. Siswa miskin penerima beasiswa

C. Instrumen Penelitian

Alat pengumpulan data atau instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan tersebut

menjadi sistematis. Adapun alat yang digunakan dalam rangka pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Pedoman wawancara, yaitu suatu daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, yang bersifat pertanyaan – pertanyaan pokok untuk mendapatkan data atau keterangan dari subyek penelitian.
- b. Panduan observasi (*observation guide*), merupakan suatu daftar yang berisi jadwal kegiatan, agenda-agenda kegiatan, maupun kelompok sasaran di SDN Nomor 04 Bengkuang, Kecamatan Kelam Permai.
- c. Untuk mendapatkan dokumen, maka penulis menggunakan alat berupa kamera, *foto*.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Data dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara yaitu metode dialog dan tatap muka yang dilakukan peneliti untuk menjaring data dan informasi dari informan secara mendalam. Untuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dan Kepala Sekolah wawancara dilakukan di Kantor dan di Sekolah. Sedangkan untuk Orang Tua Siswa, Komite Sekolah, Siswa miskin penerima beasiswa serta Siswa miskin bukan penerima beasiswa wawancara dilakukan di rumah masing – masing.
- b. Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan peneliti dalam rangka memperoleh data dan informasi yang belum terjaring melalui

wawancara, sekaligus mengecek kebenaran informasi dari informan. Observasi dilakukan baik di sekolah maupun di rumah siswa miskin penerima beasiswa serta siswa miskin bukan penerima beasiswa. Aspek – aspek yang diobservasi antara lain: kondisi sarana dan prasarana sekolah, kondisi rumah siswa, penggunaan uang beasiswa, kehidupan sehari – hari siswa dan sebagainya.

- c. Studi Dokumentasi yaitu, kegiatan yang dilakukan dengan melaksanakan studi terhadap dokumen-dokumen yang relevan. Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil dan hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

E. Metode Analisis data

Menganalisa data merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam penelitian. Penulis menggunakan pendekatan analisis kualitatif yaitu mereduksi data yang bersifat umum menjadi khusus. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan, maka data-data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif dan diinterpretasikan yang kemudian ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

Pada penelitian ini penulis akan menganalisis tentang mekanisme penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD). Adapun langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, yaitu mengumpulkan data yang akan diolah, mengenai mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan, kriteria penerimaan atau sasaran program, dan pengambilan dana penyaluran beasiswa. Selain itu juga berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran beasiswa dengan koordinasi dan kepemimpinan kepala sekolah.
2. Tahap penilaian data, yaitu menilai obyektivitas data dengan cara mengkategorikan data dengan sistem pencatatan dan perbandingan dari hasil wawancara maupun observasi pada penyaluran beasiswa di sekolah dasar desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.
3. Tahap interpretasi data, yaitu memberikan interpretasi atau penafsiran terhadap data-data yang telah diseleksi untuk kemudian diuraikan atau dijabarkan dalam bentuk pernyataan ataupun argumentasi mengenai pelaksanaan penyaluran beasiswa sekolah dasar di SDN Nomor 04 Bengkuang Kecamatan Kelam Permai serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
4. Tahap kesimpulan, yaitu merupakan tahap akhir dari analisis data, dimana peneliti memberikan keputusan akhir dari hasil penafsiran berkaitan dengan mekanisme penyaluran beasiswa sekolah dasar di desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Sekolah Dasar Negeri 04 Bengkuang

Sekolah Dasar Negeri 04 Bengkuang merupakan salah satu dari 25 Sekolah Dasar (SD) sederajat yang ada di Kecamatan Kelay Permai. Jumlah murid sampai dengan keadaan bulan April tahun 2013 sebanyak 166 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Murid Masing-Masing Kelas Pada Sekolah Dasar Negeri 04 Bengkuang Keadaan Sampai Dengan Bulan April Tahun 2013

No	Kelas	Jumlah	Prosentase
1	I	31	18,67
2	II	29	17,47
3	III	37	22,29
4	IV	30	18,07
5	V	15	9,04
6	VI	24	14,45
	Jumlah	166	100,00

Sumber: SD Negeri 04 Bengkuang, 2013.

Dari data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah murid yang paling banyak SD Negeri 04 Bengkuang adalah murid kelas III. Sedangkan jumlah murid yang paling sedikit adalah murid kelas V. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah murid berdasarkan jenis kelamin pada SD Negeri 04 Bengkuang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Murid Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Sekolah Dasar Negeri 04 Bengkuang Keadaan Sampai Dengan Bulan April Tahun 2013

No	Kelas	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1	I	18	13	31
2	II	18	11	29
3	III	15	22	37
4	IV	12	18	30
5	V	5	10	15
6	VI	10	14	24
	Jumlah	78	88	166

Sumber: SD Negeri 04 Bengkuang, 2013.

Dari data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah murid perempuan lebih banyak dari murid laki-laki. Jumlah murid perempuan sebesar 53,01% dari jumlah murid keseluruhan. Usia murid pada Sekolah Dasar Negeri 04 Bengkuang berkisar antara 5 – 14 tahun. Jumlah murid terbanyak adalah pada usia 7 tahun sedangkan yang terkecil adalah pada usia 5 dan 14 tahun.

Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah guru berdasarkan jenis kelamin pada Sekolah Dasar Negeri 04 Bengkuang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Jumlah Guru Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan Pada Sekolah Dasar Negeri 04 Bengkuang Keadaan Sampai Dengan Bulan April Tahun 2013

No	Jenis Kelamin	Pendidikan			Jumlah
		SPG	Diploma	Sarjana	
1	Laki – laki	3	5	1	9
2	Perempuan	-	5	1	6
	Jumlah	3	10	2	15

Sumber: SD Negeri 04 Bengkuang, 2013.

Dari data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa jenis kelamin guru pada Sekolah Dasar Negeri 04 Bengkuang sebagian besar adalah laki-laki. Sedangkan jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 04 Bengkuang sebagaimana terlihat pada tabel di atas menunjukkan sebagian besar adalah berpendidikan Diploma. Tingkat pendidikan ini merupakan tingkat pendidikan yang dipersyaratkan bagi guru pada jenjang SD.

Untuk sarana dan prasarana pada Sekolah Dasar Negeri 04 Bengkuang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana Pada Sekolah Dasar Negeri 04 Bengkuang Keadaan Sampai Dengan Bulan April Tahun 2013

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah/Unit	Baik	Rusak
1	Bangku murid untuk 2 orang	94	Baik	-
2	Papan tulis	6	Baik	-
3	Papan absen	6	Baik	-
4	Lemari	3	Baik	-
5	Rak buku	1	Baik	-
6	Meja guru	6	Baik	-
7	Kursi guru	6	Baik	-
8	Mesin tik	3	Baik	-
9	Buku perpustakaan	170	Baik	-
10	Alat peraga torso	3	Baik	-
11	Alat peraga globe	8	Baik	-
12	Alat peraga peta	6	Baik	-
13	Alat peraga gambar botani	3	Baik	-
14	Ruang kelas	7	Baik	-
15	Rumah dinas Kepala Sekolah	1	-	Rusak
16	Rumah dinas guru	3	-	Rusak

Sumber: SD Negeri 04 Bengkuang, 2013.

Dari data di atas, dapat diketahui sarana dan prasarana pada Sekolah Dasar Negeri 04 Bengkuang seperti: bangku murid untuk 2 orang, papan tulis, papan absen, lemari, rak buku, meja guru, kursi guru, mesik tik, buku perpustakaan, alat peraga torso, alat peraga globe, alat peraga peta, alat peraga gambar botani, serta ruang kelas seluruhnya dalam keadaan baik. Sedangkan Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Rumah Dinas Guru dalam kondisi rusak.

Kewajiban guru SD sebagai pengajar antara lain adalah: membuat perangkat program pengajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, melaksanakan analisis pekerjaan siswa, menyusun program perbaikan, membuat daftar nilai siswa, mengembangkan dan menumbuhkan kreativitas siswa serta membuat catatan kemajuan belajar siswa. Sedangkan sebagai pembimbing guru SD berkewajiban mencapai kemampuan dan strandar minimal yang ditetapkan sesuai kurikulum yang berlaku serta membantu mengatasi kesulitan belajar perlu dilaksanakan bimbingan belajar melalui program perbaikan oleh guru kelas atau guru khusus (bila memungkinkan). Bimbingan belajar dapat juga diberikan kepada siswa yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa.

Guru SD sebagai pendidik diharapkan memiliki sikap pandai bergaul dengan anak usia SD dan bersifat sabar kepada siswa, kasih sayang; dapat menumbuhkan kemauan belajar siswa, memiliki sikap kasih sayang kepada siswa, dapat mengembangkan kreativitas, serta dapat memberikan keteladanan

dalam bersikap, berperilaku, dan bertuturkata (berbahasa), sesuai dengan tingkat perkembangan anak.

Aspek Prestasi kerja guru dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain selalu melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, mempunyai pengalaman yang luas di bidang tugasnya, mempunyai kecakapan dan menguasai segala seluk beluk di bidang tugasnya, mempunyai keterampilan yang cukup dalam melaksanakan tugasnya, bersungguh-sungguh melaksanakan tugasnya kalau ada dorongan, hasil kerja yang dicapai rata-rata baik, dalam arti mutu maupun jumlah serta tidak sering terganggu kesehatan jasmani dalam pelaksanaan tugas.

Para guru diharapkan selalu berusaha memberikan saran yang dipandanginya baik dan berguna kepada atasan, baik diminta atau tidak diminta, mengenai atau yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas. Selain itu juga berusaha mencari tata cara kerja baru dalam mencapai daya guna dan hasil guna.

B. Implementasi penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD)

1. Penentuan Kriteria Calon Siswa Penerima Beasiswa

Perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang bermutu, adalah Program Nasional yang dilakukan agar semua anak usia sekolah yang belum sekolah, siswa yang putus sekolah, lulusan SD/MI/Paket A atau pendidikan yang setara untuk melanjutkan pendidikan minimal sampai jenjang

SMP/MTs/Paket B atau satuan pendidikan yang sederajat, dalam rangka

mewujudkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu faktor dominan penyebab siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi adalah faktor kemiskinan, sehingga orang tua tidak mampu memenuhi biaya anaknya untuk sekolah, baik biaya investasi, biaya operasional, dan biaya pribadi siswa.

Salah satu upaya yang sangat strategis untuk menanggulangi siswa putus sekolah adalah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Gratis. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun gratis telah dilaksanakan melalui program BOS untuk memenuhi biaya investasi dan biaya operasional siswa yang bersumber dari anggaran APBN. Untuk efektifnya pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun gratis di Kabupaten Sintang, sejak tahun anggaran 2009 Pemerintah Kabupaten Sintang telah mengalokasikan dana bantuan keuangan untuk Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar

Pemerintah mengembangkan program beasiswa sebagai satu upaya mengatasi dampak krisis yang terjadi di negara ini di bidang pendidikan khususnya penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) Sembilan Tahun. Tujuan pemberian bantuan biaya pribadi siswa miskin adalah: Membantu siswa miskin untuk memenuhi kebutuhan biaya pribadi seperti: membeli baju, sepatu, tas sekolah, transportasi ke sekolah, dan kebutuhan lainnya. Memberikan motivasi bagi siswa untuk melanjutkan

sekolahnya karena mengalami kesulitan ekonomi. Mengurangi siswa putus sekolah pada jenjang pendidikan SD. Meningkatkan APK dan APM serta mutu pendidikan. Mewujudkan percepatan pelaksanaan Program Wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun

Menurut Dunn (dalam, Muhadjir, 2000) berhasil tidaknya suatu kebijakan dapat diketahui melalui evaluasi kebijakan dengan yang memiliki fungsi yaitu memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemikiran tujuan dan target. Memberi sumbangan pada aplikasi dan metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Hasil yang diharapkan dari Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) adalah tidak terjadinya putus sekolah (drop-out) dan kualitas pengajaran tetap terjaga. Pemilihan sasaran penerima Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) adalah anak-anak dari keluarga kurang/tidak mampu berdasarkan data yang diperoleh dari BKKBN, terutama yang berasal dari Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

Menurut Martin dan Kettner (1996) bahwa ukuran pelaksanaan kebijakan mengkombinasikan tiga perspektif pertanggungjawaban yaitu : (1) perspektif efisiensi (*efficiency perspective*), (2) Perspektif kualitas (*quality perspective*), (3) Perspektif efektifitas (*effectiveness perspective*). Penentuan

penerima Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) adalah sebagai berikut: Berada di kelas 3, 4 dan 5; Baru putus sekolah tahun sebelumnya dan atau terancam putus sekolah karena kesulitan ekonomi (dari kelas 3,4 dan 5), Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain.

Ketersediaan data siswa calon penerima dana Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar yang telah memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), lengkap dengan alamat siswa/sekolah dan kecamatan dimana sekolah berada menjadi keharusan atau pra-syarat atas terlaksananya dengan baik program pemberian dana BBPSM ini. Pengelola Program Dana Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar Pemerintah Kabupaten Sintang sebelumnya harus memastikan bahwa telah tersedia data NISN khususnya di wilayah masing-masing sebagai prasyarat terlaksananya pemberian dana Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar. Bila ada Pemerintah Kabupaten Sintang yang belum memiliki database siswa yang memiliki NISN di wilayahnya, maka terlebih dahulu data tersebut dilengkapi dan meminta sekolah-sekolah segera mengirimkan data individu siswa di sekolah masing-masing dengan menggunakan format pendataan. Siswa yang diusulkan untuk menerima dana Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar harus terdaftar dalam database Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Apabila nama siswa yang diusulkan tersebut belum terdapat dalam database NISN, maka siswa yang bersangkutan diwajibkan mengisi kuesioner NISN, di Kabupaten Sintang masing-masing selanjutnya akan diproses untuk mendapatkan NISN sesuai mekanisme pendataan yang berlaku.

Dalam menganalisis proses implementasi kebijakan penyaluran bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD), maka seperti diketahui, keberhasilan program dapat dikaji dari dua perspektif yang berbeda, yaitu dari sudut proses (implementasi) dan hasil (*outcomes*). Perspektif yang pertama menekankan pada konsistensi antara pelaksanaan program dan kebijakan dengan *policy guidelines*. Menurut perspektif ini, suatu program pemerintah dikatakan berhasil kalau pelaksanaan program itu sesuai dengan *policy guidelines* yang telah ditentukan. Dari tinjauan *outcomes*, suatu program dapat dinilai berhasil kalau program itu menghasilkan dampak seperti yang diinginkan. (Dwiyanto, 1999).

Hanya siswa yang datanya terdaftar atau terecord dalam database NISN yang dapat menjadi sasaran Program Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar. Jika ada siswa yang diusulkan oleh kepala sekolah sebagai calon penerima dana Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar namun data siswa tersebut belum tercatat dalam database NISN, maka Pemerintah Kabupaten Sintang tidak boleh memberikan persetujuan, sebelum data siswa tersebut tercatat dalam database NISN. Dengan demikian diharapkan Program Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar ini mendukung tercapainya suatu penyempurnaan database siswa melalui NISN pada Departemen Pendidikan Nasional.

Semua propinsi memperoleh kuota atau jatah untuk masing-masing Kabupaten/Kota di wilayahnya, yang disesuaikan dengan jumlah siswa atau

sekolah serta indeks kemiskinan masing-masing. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh sekolah penerima Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) adalah:

- a. Bukan sekolah mahal yaitu sekolah yang tidak memiliki siswa yang berasal dari keluarga mampu terutama keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I, dan sekolah yang memungut iuran bulanan di atas Rp. 50.000,- per siswa atau sesuai dengan standar daerah masing-masing.
- b. Sekolah negeri atau sekolah swasta yang mempunyai status minimal terdaftar atau minimal memiliki SK dari instansi berwenang.
- c. Jumlah siswa masing-masing sekolah paling sedikit 90 siswa untuk SD/MI, 60 siswa MI di luar pulau Jawa, dan di luar pulau Jawa 60 siswa untuk SD/MI, serta 50 siswa untuk MI di luar pulau Jawa.

Pada SDN No 04 Bengkuang jumlah siswa penerima beasiswa sebanyak 23 orang dengan total jumlah beasiswa sebesar Rp 8.280.000, yaitu masing-masing siswa sebesar Rp 360.000. Beasiswa dan dana bantuan operasional diberikan selama 12 bulan setiap tahun mulai dari bulan Juli sampai dengan Juni tahun berikutnya. Dana Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) disalurkan langsung dari Kantor Pos Bayar di Desa Kebong (Ibukota Kecamatan Kelam Permai) kepada siswa dan komite sekolah atau sekolah yang berhak menerima.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang menyatakan bahwa proses seleksi beasiswa dilakukan dalam rapat

komite sekolah. Hal ini berarti bahwa proses seleksi penerima beasiswa telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar. Sementara itu, dua orang dari komite SD menyebutkan bahwa seleksi bagi penerima beasiswa dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Guru. Jawaban dari subjek penelitian tersebut, sangat mungkin tidak mencerminkan kondisi sebenarnya karena keduanya relatif tidak aktif dalam berbagai rapat komite SD yang dilaksanakan, sehingga kurang mengetahui secara pasti proses seleksi bagi penerima beasiswa. Hal ini sebagaimana hasil konfirmasi dengan beberapa anggota komite SD yang lain.

Hasil wawancara dengan Ketua Komite SDN Nomor 04 Bengkuang Kecamatan Kalam Permai bahwa program beasiswa merupakan program bantuan pendidikan bagi siswa miskin yang bertujuan agar siswa miskin bisa melanjutkan pendidikan dan tidak putus sekolah. Adapun syarat penerima beasiswa miskin yaitu (1) Siswa SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMK/ SMALB Negeri maupun swasta yang berasal dari keluarga kurang mampu/Pra Sejahtera (dibuktikan dengan Kartu BLT, Jamkesmas, Raskin); (2) tidak sedang menerima Bantuan Pendidikan atau beasiswa sejenis dari sumber lain; dan (3) ditetapkan sebagai penerima bantuan pendidikan untuk siswa miskin oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.

Hasil observasi yang dilakukan, untuk SDN Nomor 04 Bengkuang masih ada siswa yang belum memenuhi kriteria atau persyaratan tersebut. Menurut Ketua Komite Sekolah bahwa kriteria siswa miskin yaitu orang tuanya tidak memiliki rumah dan berpenghasilan di bawah Rp. 500.000 per

bulan. Namun ada juga orang tua murid yang mencoba mengatakan dirinya miskin karena ingin mendapatkan beasiswa, tetapi dengan adanya kerjasama antara pihak sekolah, komite sekolah dan aparat Desa Bengkuang, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Karena itu, komite sekolah akan melakukan cek dan ricek terhadap kondisi orang tua siswa yang bersangkutan. Jika ditemukan kejanggalan dalam penetapan siswa penerima akan dilaporkan secara berjenjang ke kabupaten.

Masih adanya sebagian orang tua siswa mampu yang mengaku-ngaku sebagai orang miskin ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan arti pentingnya beasiswa belum terwujud. Beasiswa bukan bertujuan untuk bagi-bagi uang, namun beasiswa bertujuan untuk membantu siswa miskin agar bisa melanjutkan pendidikan sehingga tidak putus di tengah jalan. Untuk itu jangan sampai penyaluran beasiswa tidak tepat sasaran. Dalam arti bahwa beasiswa bagi siswa miskin harus benar-benar diterima oleh siswa miskin bukan siswa mampu yang pura-pura miskin.

Hasil wawancara dengan siswa miskin dijelaskan bahwa sebelum menerima beasiswa, kepala sekolah menanyakan keadaan orang tua dan pekerjaan orang tua kepada siswa calon penerima beasiswa yang dilakukan pada saat jam sekolah. Kemudian kepala sekolah mendatangi rumah siswa miskin untuk melakukan pendataan dan mengecek kebenaran keadaan siswa miskin. Pendataan siswa miskin dilakukan oleh kepala sekolah bersama dengan komite sekolah dan aparat Desa Bengkuang.

Hasil wawancara dengan siswa miskin bahwa kriteria untuk mendapatkan beasiswa miskin yaitu orang tua tidak memiliki rumah, rumah dianggap tidak layak, penghasilan orang tua di bawah Rp. 500.000. Selain itu, persyaratan lainnya adalah data siswa dan surat keterangan miskin dari kepala desa. Adapun penyaluran beasiswa dilakukan dengan pembagian langsung oleh kepala sekolah melalui orang tua siswa miskin. Besarnya beasiswa yang diterima siswa miskin adalah Rp. 360.000 per tahun. Dalam penyaluran beasiswa, tiap siswa miskin dikenakan potongan Rp. 10.000 yang digunakan untuk biaya transportasi kepala sekolah, komite sekolah dan wakil siswa mengambil uang beasiswa ke kantor pos serta untuk administrasi sekolah. Potongan ini merupakan kesepakatan antara kepala sekolah, komite sekolah dan orang tua murid.

Hasil wawancara dengan kepala sekolah dijelaskan bahwa sudah tiga tahun ini SDN Nomor 04 Bengkuang Kecamatan Kelam Permai mendapatkan beasiswa bagi siswa miskin. Untuk memastikan kondisi siswa miskin, kepala sekolah, komite sekolah dan aparatur desa mendatangi rumah siswa miskin. Kemudian melakukan pendataan serta pengajuan nama-nama calon penerima beasiswa miskin ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Dalam pendataan dan pengajuan calon penerima beasiswa, kepala sekolah berkonsultasi dengan komite sekolah agar terjadi transparansi pengajuan calon penerima beasiswa.

Dalam penyaluran beasiswa bagi siswa miskin tingkat sekolah dasar, kepala sekolah sebagai fasilitator dan bertanggungjawab terhadap kelancaran

penyaluran beasiswa. Jumlah siswa yang diajukan untuk menerima beasiswa miskin tahun 2009 di SDN Nomor 04 Bengkuang Kecamatan Kelam Permai sebanyak 84 orang siswa, tetapi sesuai dengan buku petunjuk dari Kementerian Pendidikan Nasional hanya 23 orang karena yang menerima beasiswa hanya kelas III, IV dan V.

Tabel 4.5. Daftar Siswa Penerima BSM-SD Pada SDN No.04 Bengkuang Tahun 2011

No	Nama Siswa	Kelas	Jumlah (Rp)
1	Pelipus Juanto	III	360.000.
2	Dimas Nugraha	III	360.000.
3	Sulistyo	III	360.000.
4	Jinan Purwanto	III	360.000.
5	Zulfian	III	360.000.
6	Zakaria Akianto	III	360.000.
7	Kiki Yohana	III	360.000.
8	Lanti	III	360.000.
9	Kabuk Sukarman	IV	360.000.
10	Greselia	IV	360.000.
11	Suhaartono	IV	360.000.
12	Parlan Sitohang	IV	360.000.
13	Budi Santoso	IV	360.000.
14	Cepi Anindya P	IV	360.000.
15	Dadang B	IV	360.000.
16	Anwardiman	IV	360.000.
17	Rangga	V	360.000.
18	Yudius	V	360.000.
19	Martin	V	360.000.
20	Gimang	V	360.000.
21	Sunu	V	360.000.
22	M. Nafiah	V	360.000.
23	Haerudin	V	360.000.

Sumber: SD Negeri 04 Bengkuang, 2012.

Tabel 4.5. Daftar Siswa Penerima BSM-SD Pada SDN No.04 Bengkuang Tahun 2012

No	Nama Siswa	Kelas	Jumlah (Rp)
1	Ahmad Zaini	III	360.000.
2	Dira Taufan	III	360.000.
3	Yohanes Engkak	III	360.000.
4	Petrus Aditya	III	360.000.
5	Mirnawati Sainun	III	360.000.
6	Yossy Ika Dewi	III	360.000.
7	Dian Anggraeni	III	360.000.
8	Yakobus Indiatro	III	360.000.
9	Pelipus Juanto	IV	360.000.
10	Dimas Nugraha	IV	360.000.
11	Yohan Dian Margareta	IV	360.000.
12	Anastasia Dwiyanti	IV	360.000.
13	Paulus Yoga	IV	360.000.
14	Herman Aminudin	IV	360.000.
15	Kiki Yohana	IV	360.000.
16	Merlisa	IV	360.000.
17	Kabuk Sukarman	V	360.000.
18	Greselia	V	360.000.
19	Suhaartono	V	360.000.
20	Parlan Sitohang	V	360.000.
21	Budi Santoso	V	360.000.
22	Cepi Anindya P	V	360.000.
23	Dadang B	V	360.000.

Sumber: SD Negeri 04 Bengkuang, 2013.

Memperhatikan data pada tabel di atas, dapat diketahui Siswa Penerima BSM-SD Pada SDN No.04 Bengkuang Tahun 2012 terdiri atas siswa kelas III sebanyak 8 orang, siswa kelas IV sebanyak 8 orang dan siswa kelas V sebanyak 7 orang. Siswa – siswa tersebut memang dikategorikan dari keluarga yang tidak mampu.

Berdasarkan hasil observasi juga terlihat bahwa kondisi ekonomi orang tua siswa miskin dan penghasilan orang tua miskin yang tidak menentu

merupakan salah satu syarat penerima beasiswa miskin. Hasil observasi yang dilakukan, sebagian besar pekerjaan orang tua siswa penerima beasiswa miskin adalah petani dan buruh pada perkebunan sawit yang ada di kecamatan Kelam Permai. Adanya beasiswa bagi siswa miskin sangat membantu keuangan orang tua murid dan siswa miskin untuk tetap melanjutkan pendidikan sehingga tidak putus di tengah jalan.

2. Mekanisme Penetapan Siswa Penerima Beasiswa

Martin dan Kettner (1996) menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: *Output* (hasil kerja kebijakan) untuk mengukur efisiensi kebijakan, apakah hasil yang dicapai sesuai dengan biaya (*cost*) yang dikeluarkan. *Quality output* (mengukur kualitas kebijakan) apakah kualitas yang dilakukan dalam program ini memuaskan kelompok sasaran. *Outcomes* (dampak kebijakan) yaitu dampak jangka panjang pelaksanaan suatu kebijakan. Sedangkan efektifitas merupakan *policy action* yang diambil atau ditempuh, mampu mencapai *policy goal* yang diinginkan karena setiap kebijakan mempunyai tujuan.

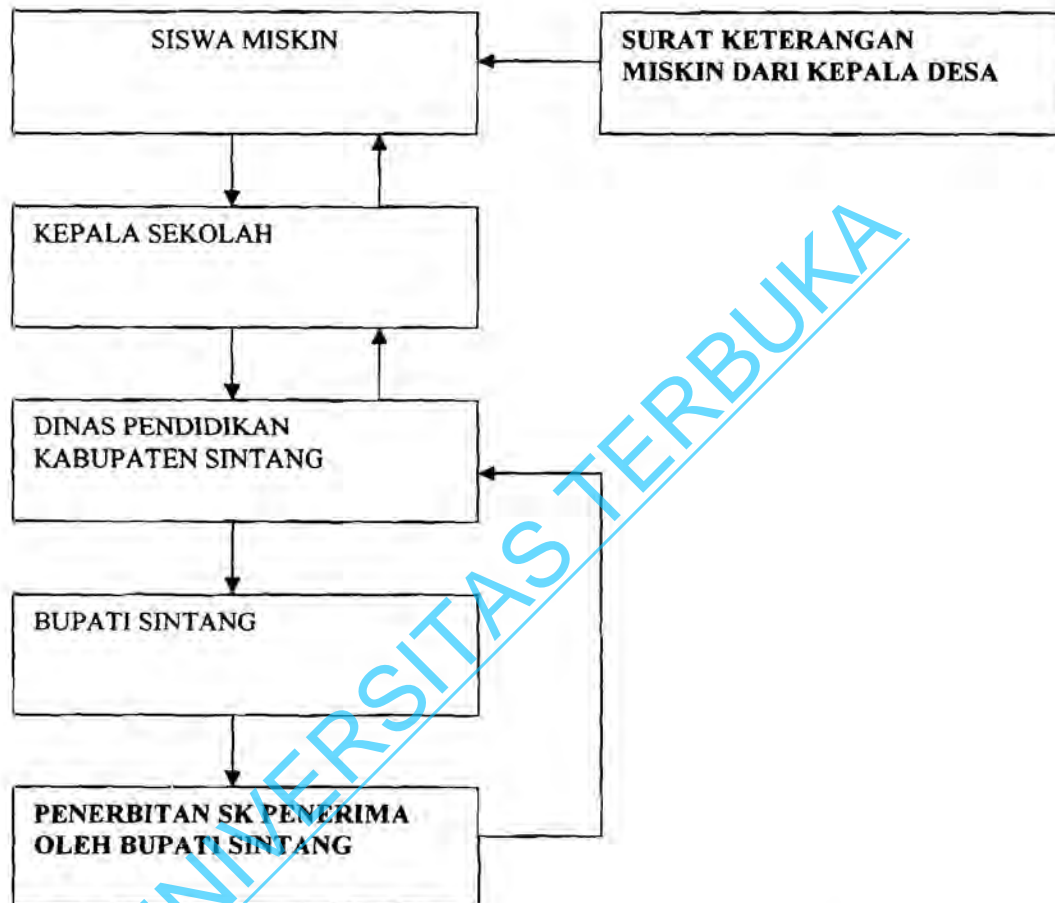
Proses penetapan penerima Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar adalah Penjaringan Siswa miskin di Tingkat Sekolah. Seleksi kelengkapan administrasi Siswa calon penerima Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar di Tingkat Kabupaten Sintang untuk diusulkan kepada Pengelola Program Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten sesuai dengan

Jumlah yang telah dialokasikan. Pengesahan data Siswa calon penerima Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar

Dalam konteks kejelasan/konsistensi tujuan, dapat dikatakan bahwa semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun menurut urutan kepentingannya bagi para pejabat pelaksana dan aktor-aktor lainnya, semakin besar pula kemungkinan bahwa *output* kebijakan dari badan-badan pelaksana, dan pada gilirannya perilaku kelompok-kelompok sasaran, akan sejalan dengan petunjuk-petunjuk tersebut. Sebagaimana Sabatier dan Mazmanian (Wahab, 2001) mengatakan bahwa tujuan-tujuan resmi yang dirumuskan dengan cermat dan disusun secara jelas sesuai dengan urutan kepentingan memainkan peranan yang amat penting sebagai alat bantu dalam mengevaluasi program, sebagai pedoman yang kongkrit bagi pejabat-pejabat pelaksana dan sebagai sumber dukungan bagi tujuan itu sendiri.

Pendataan dan Pengusulan Siswa Miskin Calon Penerima Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar, Data Siswa Miskin dibuat dalam Tabel Rekapitulasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang untuk diverifikasi dan disetujui oleh Bupati. Proses pendataan dan pengusulan calon penerima Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4.1. Pendataan dan Pengusulan Calon Penerima Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar di Kabupaten Sintang



Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran beasiswa bagi siswa miskin jenjang sekolah dasar Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah

Pendataan dan Pengusulan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, Data siswa miskin calon penerima Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dan disetujui oleh Bupati, disertai dengan data – data siswa yang lengkap.

Penyampaian informasi yang terbuka dalam bentuk menempelkan

pengumuman mengenai beasiswa dari Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

SD) pada papan pengumuman sekolah mengindikasikan adanya keterbukaan pihak sekolah atau komite sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD).

Pengumuman bagi siswa penerima beasiswa, menurut pengakuan komite sekolah bervariasi atau digabung dalam beberapa cara, yaitu: diumumkan pada saat upacara sekolah, diumumkan di papan pengumuman sekolah dan diumumkan di kelas.

Informasi umum penetapan siswa penerima beasiswa oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Kepala Sekolah, dan Komite Sekolah, semua Informan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Kepala Sekolah, dan Komite Sekolah menyatakan bahwa sekolah telah menerima poster informasi umum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Kepala Sekolah, dan Komite Sekolah dan ditempelkan di papan pengumuman. Apabila dikaitkan dengan data sebelumnya yang diperoleh dari siswa penerima beasiswa, data dari komite SD ternyata bertolak belakang. Hal ini dapat dibuktikan dari data yang diperoleh dari siswa SD bahwa mereka mengetahui adanya beasiswa dari pengumuman guru kelas dan bukan dari pengumuman yang terpajang di ruang pengumuman.

Pengumuman penerima beasiswa pada sebagian siswa tidak mengetahui melalui papan pengumuman, mereka mengetahui adanya Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) dari guru kelas. Dari hasil wawancara

terungkap bahwa siswa SD tidak pernah membaca adanya pengumuman mengenai Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD).

Prosedur yang harus ditempuh serta persyaratan yang harus dilengkapi untuk memperoleh beasiswa diuraikan oleh siswa penerima beasiswa bahwa setelah komite sekolah mendata calon penerima beasiswa, maka berikutnya calon penerima beasiswa tersebut ditentukan oleh kepala sekolah agar orang tua siswa yang bersangkutan menghadap ke kepala sekolah kemudian orang tua datang menghadap kepala sekolah untuk diwawancarai, orang tua siswa mengurus surat keterangan tidak mampu dan melampirkannya pada berkas usulan.

Semua siswa SD, sebagaimana hasil wawancara mengungkapkan bahwa mereka tidak tahu persyaratan apa saja yang harus dilengkapi untuk memperoleh beasiswa. Hal ini menurut mereka disebabkan semua proses diurus oleh orang tua mereka setelah orang tua menghadap kepala sekolah.

Dalam penilaian semua Informan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Kepala Sekolah, dan Komite Sekolah menyatakan, hasil alokasi beasiswa di Desa Bengkuan sebagian besar (72,7 %) telah tepat sasaran, yaitu diberikan kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu tetapi memiliki prestasi belajar yang baik. Namun demikian, masih ada alokasi dana beasiswa kurang tepat sasaran. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi penerima beasiswa yang ternyata berasal dari keluarga relatif mampu, apabila dibandingkan dengan siswa lainnya yang tidak berkesempatan menerima

beasiswa. Kondisi ini dimungkinkan karena indikator utama yang dipergunakan bukan sekedar kemampuan ekonomi keluarga tetapi juga prestasi belajar siswa. Pada saat komite sekolah dihadapkan pada kondisi calon penerima beasiswa dengan tingkat ekonomi dan prestasi belajar siswa yang relatif berbeda, maka pilihan dijatuhkan pada salah satu dari kedua kondisi tersebut.

Kesulitan dihadapi dalam mengalokasikan dana Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) adalah dalam hal penetapan sekolah dan siswa calon penerima beasiswa, karena alokasi sasaran dari pusat tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang tetap bersumber pada data angka kemiskinan tiap-tiap kecamatan dan pemerataan kepada sekolah yang tidak mampu, tetapi tetap pada kriteria yang telah ditetapkan dari Pusat.

Menghadapi masalah tersebut, maka mereka menyarankan agar dalam pengalokasian dana Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) hendaknya berpegang pada data yang disampaikan dari lapangan/sekolah, karena data dari bawah adalah data riil yang terjadi. Terdapatnya kesulitan yang dihadapi komite kabupaten dalam hal penetapan sekolah dan siswa calon penerima beasiswa yang disebabkan alokasi sasaran dari pusat tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan, mengindikasikan masih kuatnya nuansa sentralisasi dalam penetapan target sasaran beasiswa dan dana bantuan operasional. Penetapan standar penerima beasiswa oleh perumus kebijakan di pusat, akan

menyebabkan biasanya data lapangan dengan standar yang ditentukan. Dalam mengatasi masalah ini, dalam pengalokasian dana beasiswa tetap bersumber pada data angka kemiskinan tiap-tiap kecamatan dan pemerataan kepada sekolah yang tidak mampu, tetapi tetap pada kriteria yang telah ditetapkan dari Pusat. Oleh karena itu mereka menyarankan agar dalam pengalokasian dana Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) hendaknya berpegang pada data yang disampaikan dari lapangan/sekolah, karena data dari bawah adalah data riil yang terjadi.

Ditetapkannya seorang siswa menjadi penerima Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar dilakukan setelah melalui suatu proses, mulai dari pengusulan oleh kepala sekolah, pemeriksaan usulan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang (Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang yang disetujui oleh Bupati Sintang) serta penerbitan SK Penetapan siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar sampai dengan siswa yang bersangkutan menjadi penerima dana Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar.

Namun seorang siswa yang telah ditetapkan menjadi calon penerima dana BBPSM dapat dibatalkan penetapannya atau haknya sebagai penerima, jika dikemudian waktu ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Ditemukan bukti bahwa data siswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pedoman pelaksanaan, baik karena data semula sengaja atau tidak sengaja dipalsukan atau karena

kesalahan penilaian oleh pemeriksa dari Pemerintah Kabupaten Sintang dan Sekolah.

2. Siswa yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya.
3. Yang bersangkutan tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai siswa di sekolah tempat yang bersangkutan diusulkan sebagai penerima Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar.
4. Siswa yang bersangkutan telah meninggal dunia
5. Jika terdapat satu Siswa menerima dua Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar karena diusulkan dari dua sumber dana atau lebih, maka salah satu dari Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar dan sejenisnya tersebut harus dibatalkan dan wajib dikembalikan ke kas Negara.

3. Mekanisme Pengambilan Dana Beasiswa

Penyaluran dana Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar dilakukan oleh Dinas Pendidikan ke Kas Daerah Kabupaten Sintang, Selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang menyalurkan kepada siswa penerima melalui mitra (PT. Kantor Pos). Penyaluran dana Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar dilaksanakan selama 40 hari setelah surat pemberitahuan diterima oleh dinas pendidikan Kabupaten Sintang. Kantor Pos Bayar menginformasikan ke dinas pendidikan Kabupaten Sintang dan Kepala Sekolah, bahwa dana

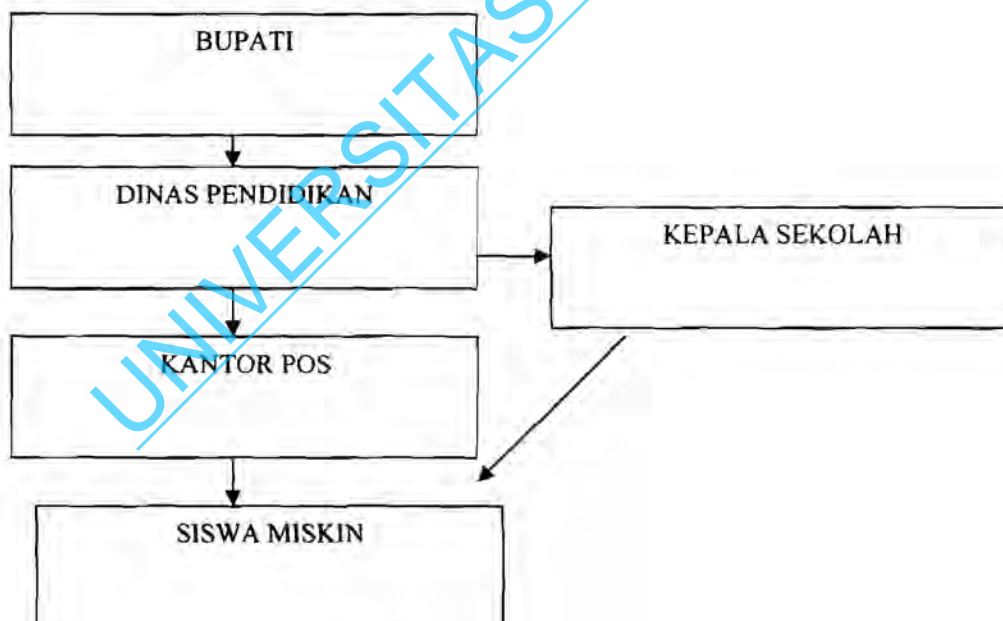
Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar telah dapat diambil oleh siswa penerima dana Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar.

Pengambilan dana Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dana Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar dapat diambil langsung oleh siswa penerima dana Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar untuk satu tahun pelajaran dengan syarat:
 - a. Menunjukkan surat keterangan dari kepala sekolah.
 - b. Menunjukkan SK penerima dana Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar.
 - c. Menandatangani bukti penerimaan yang disediakan oleh kantor Pos.
 2. Pengambilan dana Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar dapat dilakukan secara kolektif oleh kepala sekolah dengan syarat:
 - a. Ada surat kuasa kolektif dari siswa penerima dana Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar dengan membawa SK penerima dana Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar.
 - b. Penerima kuasa kolektif adalah kepala sekolah yang bersangkutan dan diketahui oleh komite sekolah.
 - c. Menandatangani bukti penerimaan yang disediakan oleh kantor pos.
-

3. Kepala sekolah penerima kuasa harus segera memberikan dana Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar tersebut kepada siswa penerima sesuai dengan SK Bupati.
4. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan (40 hari) Dana Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar tersebut belum diambil, maka dana tersebut dikembalikan oleh Kantor Pos Ke rekening dana Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar.

Gambar 4.2. Alur Penyaluran Dana Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar di Kabupaten Sintang



Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran beasiswa bagi siswa miskin jenjang sekolah dasar Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah

Komite sekolah menyatakan bahwa dana beasiswa diambil ke Kantor Pos berkisar antara bulan Agustus sampai dengan Desember. Selanjutnya dalam hal pengambilan beasiswa, komite sekolah menyebutkan bahwa

pengambilan dana beasiswa dilakukan secara kolektif oleh sekolah. Hal ini sama dengan informasi sebelumnya yang diberikan oleh siswa penerima beasiswa. Dalam hal ini, sumber dana yang dipergunakan untuk mengambil dana beasiswa berasal dari kas sekolah dan bahkan dikatakan tanpa biaya. Hal ini merupakan indikasi baik bahwa dana beasiswa tidak dipotong misalnya untuk transport ke kantor pos oleh pihak sekolah.

Berikut ini disajikan hasil pengumpulan data yang dipertegas dengan wawancara dengan siswa yang bersangkutan berdasarkan enam tema, yaitu: diketahui tidaknya Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) dan prosedur memperoleh beasiswa, cara pengambilan beasiswa, diketahui tidaknya jumlah beasiswa, utuh tidaknya beasiswa yang diterima dan penggunaan beasiswa, penyimpanan uang beasiswa, diketahui tidaknya penerimaan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) oleh sekolah.

Berkaitan dengan cara mengambil beasiswa, hasil observasi menunjukkan adanya kesamaan dalam pengambilan dana beasiswa, yaitu kesemuanya mengambil beasiswa secara kolektif oleh komite sekolah. Alasan yang diajukan oleh siswa penerima beasiswa atas kondisi tersebut, sebagaimana terungkap dalam wawancara adalah bahwa mereka selama ini tidak pernah diperintahkan oleh sekolah untuk mengambil langsung uang beasiswanya di kantor pos. Disamping itu, mereka juga menyatakan ketidaktahuannya bahwa uang beasiswa tersebut dapat diambil sendiri oleh penerima beasiswa, walaupun mengetahui bahwa beasiswa tersebut dapat

diambil sendiri, mereka menyatakan lebih praktis mengambilnya melalui komite sekolah.

Semua siswa SD penerima beasiswa menyatakan ketidaktahuannya atas jumlah dana beasiswa yang seharusnya mereka terima. Hal ini dimungkinkan karena sebagaimana dinyatakan oleh siswa SD penerima beasiswa bahwa pengambilan beasiswa dari sekolah dilakukan oleh pihak orang tua, sehingga disamping mereka tidak mengetahui jumlah nominal uang beasiswa yang diterima, mereka juga tidak mengetahui ada tidaknya pemotongan.

Dari hasil wawancara terungkap bahwa siswa penerima beasiswa mengetahui jumlah dana beasiswa yang dapat mereka terima dari guru sekolah serta dari orang tua. Diketuainya jumlah beasiswa ini dapat digunakan untuk mengecek tingkat penyimpangan dana beasiswa apabila ternyata siswa yang bersangkutan menerima beasiswa yang besarnya tidak sama dengan yang mereka ketahui. Sebagaimana tertangkap dari hasil wawancara, dalam pertanyaan menyangkut utuh tidaknya jumlah beasiswa yang diterima, semua siswa SD menyatakan tidak tahu karena yang mengambil uang beasiswa adalah orang tua mereka dengan jalan datang ke sekolah.

Pengambilan beasiswa bagi siswa miskin dilakukan oleh pihak sekolah setelah mendapatkan surat pemberitahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, kemudian kepala sekolah mengundang komite sekolah dan orang tua siswa miskin untuk menentukan siapa yang mewakili komite sekolah dan

orang tua murid yang ikut mengambil dana beasiswa ke kantor pos. Setelah kepala sekolah, perwakilan komite sekolah dan orang tua siswa mengambil dana beasiswa, kemudian dana beasiswa tersebut diserahkan kepada orang tua murid yang disaksikan oleh komite sekolah. Dalam penyaluran beasiswa, berdasarkan kesepakatan antara kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua murid, setiap siswa penerima beasiswa dikenakan potongan Rp. 10.000 yang digunakan untuk biaya transport kepala sekolah, perwakilan komite sekolah dan perwakilan orang tua murid mengambil dana beasiswa ke kantor pos.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, akan mempertimbangkan usulan agar mengubah sistem penyaluran beasiswa bagi siswa miskin terutama bagi siswa SD di daerah pedalaman. "Sistem penyaluran lewat kantor pos menyulitkan siswa yang berada di wilayah terisolir, dan kondisi itu telah dilihat langsung oleh staf dari Dinas Pendidikan, kemungkinan ada pertimbangan tahun 2014 sistem penyaluran diubah, seperti semula lewat kepala sekolah," kata kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.

Hal itu disampaikan terkait hampir mayoritas siswa miskin di wilayah terisolir yang sulit dijangkau menggunakan kendaraan roda empat mengambil beasiswa di kantor pos di wilayah kecamatan setempat. "Keterangan dari pihak kantor pos menyebutkan masih banyak uang subsidi bagi siswa miskin (SSM) belum diambil," ujarnya. Padahal kata dia, sebelumnya sudah ada pemberitahuan dari dinas kepada setiap kepala sekolah SD kemudian kepada siswa miskin yang menerima bantuan SSM tersebut.

Namun, lanjutnya, siswa tetap saja tidak bisa mengambil sendiri beasiswa karena akses jalan termasuk jarak sehingga biaya yang dikeluarkan cukup besar, sehingga uang beasiswa habis di jalan. Sebaiknya, kata dia, penyaluran beasiswa untuk siswa miskin diubah seperti semula yakni dari dinas pendidikan terlebih dahulu selanjutnya disampaikan kepada kepala sekolah dan pimpinan sekolah itu yang mengambil dan membagikan kepada siswa.

Karena dengan jumlah nominal beasiswa untuk satu tahun yang diterima oleh siswa SD sebesar Rp360.000 per orang justru tidak sesuai dengan biaya yang harus mereka keluarkan untuk mengambil uang tersebut. "Kita bisa saja hitung dengan dana sebesar itu sudah berapa banyak ongkos dan biaya yang harus dikeluarkan belum lagi saat datang ke kantor pos uang belum masuk atau petugasnya sedang keluar jadi urusan tidak bisa selesai hanya dalam satu hari saja," ujarnya.

Selain kesulitan siswa miskin tingkat SD mengambil beasiswa di kantor pos, ia menjelaskan, pihak dinas pendidikan juga hingga sekarang tidak mengetahui berapa banyak kuota siswa yang mendapatkan beasiswa yang bersumber dari APBN. "Kalau dulu ada laporan dan kuota siswa termasuk nama penerimanya, kini kami tidak tahu apakah kuota yang dapat dengan yang diusulkan sama atau tidak karena informasi yang kami terima justru berbeda dan ada penambahan," ujarnya lagi.

4. Penggunaan Dana Beasiswa

Berkenaan dengan itu, Anderson (Islamy:2000:76) mengungkapkan 4 (empat) aspek yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu: (1) Siapa yang dilibatkan dalam implementasi; (2) Hakikat proses administrasi; (3) Kepatuhan atas suatu kebijakan; dan (4) Efek atau dampak dari isi implementasi. Ke empat aspek sebagaimana disebutkan di atas merupakan serangkaian tata pelaksanaan yang tidak dapat dipisahkan dari proses implementasi kebijakan publik, sehingga setiap kebijakan yang telah ditetapkan dapat di implementasikan berdasarkan pada penentuan unit pelaksana.

Penggunaan dana beasiswa adalah untuk Biaya Pribadi Siswa Miskin. Adapun biaya tersebut adalah biaya yang akan dimanfaatkan oleh siswa untuk kebutuhan perongkosan dari rumah menuju sekolah atau pulang dari sekolah menuju ke rumah, biaya pembelian sepatu sekolah dan baju seragam sekolah, tas sekolah atau biaya pembelian alat tulis dan buku tulis

Dalam hal penyimpanan uang beasiswa, dijawab oleh siswa penerima beasiswa bahwa mereka tidak menyimpan sendiri uang beasiswa yang telah mereka terima, tetapi disimpan oleh orang tua mereka. Penyimpanan uang beasiswa oleh orang tua, menurut para siswa disebabkan karena mereka selama ini tidak terbiasa menerima uang dalam jumlah yang relatif besar, disamping juga atas perintah masing-masing orang tua agar dana beasiswa tersebut diserahkan kepada mereka. Di sisi lain hal ini mencerminkan dua hal, pertama

mencerminkan belum percayanya orang tua kepada anak-anak atau siswa untuk mengelola sendiri uang beasiswa yang mereka terima, kedua mencerminkan begitu rendahnya kemampuan ekonomi orang tua dari siswa penerima beasiswa sehingga harus menyimpan dan mempergunakan dana beasiswa anak-anak mereka untuk berbagai keperluan, khususnya yang berkaitan dengan sekolah.

Sebagaimana tertangkap dari wawancara, dalam pertanyaan menyangkut utuh tidaknya jumlah beasiswa yang diterima, semua siswa SD menyatakan tidak tahu karena yang mengambil uang beasiswa adalah orang tua mereka dengan jalan datang ke sekolah. Dari sisi penggunaan, semua siswa penerima beasiswa menyatakan bahwa dana beasiswa mereka pergunakan terutama untuk kepentingan sekolah, membeli buku dan ongkos transport ke sekolah. Penggunaan dana beasiswa ini sesuai dengan petunjuk teknis yang menyangkut penggunaan dana beasiswa yang dapat dibenarkan.

Penyampaian laporan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) masih banyak yang terlambat, bahkan harus dijemput ke sekolah. Hal ini mengakibatkan terganggunya proses penyampaian laporan ke jenjang berikutnya. Menghadapi masalah keterlambatan penyampaian laporan tersebut, maka pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang menerapkan strategi “menjemput bola”, yaitu menugaskan staf untuk mengambil laporan dari komite sekolah dan juga menitipkan tugas ini kepada pengawas sekolah. Disamping itu, hampir setiap ada kesempatan selalu disampaikan teguran oleh

Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dalam hal penyampaian laporan oleh komite sekolah.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Penyaluran Beasiswa Bagi Siswa Miskin Jenjang Sekolah Dasar

1. Komunikasi

Berdasarkan pendapat George Edwards III, implementasi penyaluran bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) dipengaruhi oleh faktor – faktor : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Keberhasilan implementasi kebijakan penyaluran bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target groups*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Hasil wawancara dengan Ketua Komite Sekolah dijelaskan bahwa dalam penyaluran beasiswa bagi siswa miskin kepala sekolah selalu mengajak koordinasi dengan komite sekolah dan orang tua murid. Bentuk koordinasi adalah adanya rapat atau musyawarah selama 3 (tiga) kali bersama komite sekolah, kepala sekolah dan orang tua murid mulai dari perencanaan, pengambilan dana dan penyaluran beasiswa bagi siswa miskin. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan bersama dengan aparatur desa untuk melihat langsung kondisi orang tua miskin, sehingga penyaluran beasiswa miskin tepat sasaran. Adanya koordinasi yang baik antara

kepala sekolah, komite sekolah dan orang tua murid berpengaruh terhadap

kelancaran penyaluran beasiswa sehingga mengurangi resiko kesalahan dan penyimpangan.

Selain itu dalam rangka penyaluran beasiswa bagi siswa miskin, koordinasi antara kepala sekolah, komite sekolah dan orang tua murid harus ada konsep kesatuan tindakan (*unity action concepts*), hal ini merupakan inti daripada koordinasi. Kesatuan daripada usaha, berarti bahwa kepala sekolah harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan antara kepala sekolah, komite sekolah dan orang tua murid merupakan suatu keharusan dalam rangka memperoleh suatu koordinasi yang baik. Dengan mengatur jadwal waktu dan pertemuan, dimaksudkan agar kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang direncanakan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Menurut kepala sekolah bahwa dalam rangka penyaluran beasiswa bagi siswa miskin, kepala sekolah mengajar koordinasi dengan komite sekolah dan orang tua murid. Proses koordinasi dilakukan dengan mengadakan rapat berkaitan dengan kriteria penerima beasiswa, pendataan siswa miskin, pengambilan dana beasiswa serta penyaluran beasiswa. Koordinasi berfungsi sebagai kontrol terhadap penyaluran beasiswa sehingga pihak-pihak yang berkaitan dengan pengurusan beasiswa bisa mengetahui dan mengerti kriteria siswa miskin, prosedur atau mekanisme pengajuan, proses pengambilan dana beasiswa dan penyaluran beasiswa bagi siswa miskin. Adanya koordinasi ini

diharapkan, menyatukan langkah dan gerak dari kepala sekolah, komite sekolah dan orang tua murid dalam penyaluran beasiswa sehingga tidak terjadi salah paham dan salah pengertian.

Menurut kepala sekolah, pengaruh adanya koordinasi dalam kepemimpinan kepala sekolah dalam penyaluran beasiswa bagi siswa miskin adalah menimbulkan persamaan persepsi, gerak dan langkah antara kepala sekolah, komite sekolah dan orang tua murid sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran atau ketidakjelasan penyaluran beasiswa. Adanya koordinasi yang baik menyebabkan semua proses penyaluran beasiswa mulai dari perencanaan dan pendataan, pengajuan calon penerima beasiswa, pengambilan dana beasiswa sampai dengan penyaluran beasiswa dapat diketahui, diawasi serta dipertanggungjawabkan.

2. Sumber Daya

Sumberdaya implementasi penyaluran bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) dapat berupa sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial sehingga implementasi tidak akan berjalan efektif. Berdasarkan penelitian lapangan, terlihat bahwa implementasi Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut:

1. Ketersediaan anggaran pemerintah

Terbatasnya jumlah anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung kebijakan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) sangat

mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Dalam kaitan dengan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD), terbatasnya anggaran pemerintah tersebut telah menyebabkan terbatasnya jumlah siswa yang dapat memperoleh beasiswa, sehingga banyak siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu tidak memperoleh beasiswa.

Demikian halnya dengan sekolah yang belum memiliki peralatan penunjang pendidikan dan kondisi fisiknya kurang memadai, masih banyak yang belum dapat memperoleh dukungan dana operasional pendidikan.

2. Tingkat pemahaman isi kebijakan

Isi kebijakan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) yang kurang dipahami sepenuhnya oleh pihak pelaksana di lapangan, yaitu komite sekolah, komite kecamatan dan komite kabupaten menyebabkan adanya beberapa penyimpangan dalam implementasinya di lapangan. Penyimpangan tersebut antara lain: diambilnya dana beasiswa pendidikan secara kolektif oleh pihak sekolah, dipotong secara langsung dana beasiswa pendidikan untuk keperluan membayar uang sekolah, terlambatnya penyusunan dan penyampaian laporan implementasi Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) oleh komite sekolah dan komite kecamatan.

Penyimpangan tersebut lebih disebabkan oleh faktor yang tidak disengaja yaitu tingkat pemahaman isi kebijakan yang kurang utuh, karena terbukti tidak adanya maksud dari pihak pelaksana di lapangan untuk menggunakan dana beasiswa yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

3. Kontrol masyarakat

Efektivitas implementasi kebijakan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) sangat dipengaruhi oleh sejauhmana masyarakat melakukan kontrol sosial atas penerapan kebijakan tersebut. Keluhan dan pengaduan masyarakat, baik secara individu maupun secara berkelompok akan dapat memperlihatkan kondisi nyata di lapangan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor kebijakan penyaluran bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD), seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Hasil wawancara dengan Ketua Komite Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor 04 Bengkuang Kecamatan Kelam Permai bahwa peran Kepala Sekolah sebagai edukator dalam penyaluran beasiswa bagi siswa miskin adalah kepedulian dan keprihatinan kepala sekolah dengan keadaan siswa miskin yang ada di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor 04 Bengkuang Kecamatan Kelam Permai. Untuk itu kepala sekolah sebagai edukator harus mampu menciptakan hubungan harmonis dengan dewan guru, komite sekolah, murid dan orang tua murid atau dengan masyarakat sekitar lingkungan sekolah.

Kepala Sekolah SDN Nomor 04 Bengkuang Kecamatan Kelam Permai juga dihadapkan pada suatu kondisi untuk memajukan pendidikan, baik guru maupun siswa. Untuk itu melalui penyaluran beasiswa bagi siswa miskin diharapkan mengurangi jumlah siswa yang keluar sekolah karena ketidakmampuan dari segi ekonomi. Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap kepedulian terhadap kondisi sosial siswa miskin. Kepedulian ini ditunjukkan dengan mendatangi rumah orang tua siswa miskin untuk mengetahui kondisi ekonomi keluarganya. Kepala sekolah juga berusaha untuk menjaga keutuhan anak didiknya agar tidak putus sekolah karena kekurangmampuan biaya. Usaha yang dilakukan adalah dengan mendata dan mengumpulkan siswa miskin kemudian diajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang untuk mendapatkan beasiswa bagi siswa miskin.

Hasil wawancara dengan siswa miskin dijelaskan bahwa kepemimpinan kepala sekolah dapat dilihat dari perhatian dan kepedulian kepala sekolah terhadap kondisi siswa. Perhatian dan kepedulian kepala sekolah ditunjukkan dengan mendatangi rumah orang tua siswa miskin untuk mengetahui kondisi ekonomi. Selain itu, kepala sekolah juga memberikan buku sekolah dan selalu memberikan motivasi agar belajar yang rajin, bisa berprestasi dan tidak minder.

Seorang pemimpin yang mengetahui dan memahami kondisi orang di sekitarnya, akan merasakan penderitaan yang sama sehingga menimbulkan *sense* kepedulian dan menggugah hati nurani untuk dapat berbuat sesuatu

sehingga bisa mengubah keadaan tersebut. Kepemimpinan kepala sekolah dalam penyaluran beasiswa bagi siswa miskin merupakan bentuk pendidikan moral yang diberikan oleh kepala sekolah kepada warga sekolah agar memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain.

Menurut kepala sekolah bahwa sudah menjadi tanggungjawab sebagai pemimpin di lingkungan sekolah untuk peduli dengan warga sekolah. Apabila ada siswa yang tidak mampu membayar uang sekolah maka sudah sewajarnya kalau kepala sekolah mencari jalan keluarnya sehingga siswa tersebut tidak putus sekolah. Salah satu cara adalah melalui penyaluran beasiswa bagi siswa miskin. Dengan adanya beasiswa ini diharapkan mampu mengurangi beban hidup bagi orang tua siswa miskin serta siswa miskin tidak putus sekolah.

Kepala sekolah bersama komite sekolah, dewan guru dan orang tua murid bersama-sama bermusyawarah untuk pendataan dan penyaluran beasiswa. Musyawarah dilakukan untuk mendapatkan persamaan persepsi sehingga tidak terjadi salah paham serta dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas penyaluran beasiswa.

Kepala sekolah selain berfungsi sebagai edukator juga berfungsi sebagai supervisor. Untuk itu kepala sekolah harus melakukan pengawasan terhadap penyaluran beasiswa bagi siswa miskin. Beasiswa harus dipastikan tepat sasaran dan tepat guna. Selain itu juga jangan sampai ada potongan atau pungutan apapun alasannya karena beasiswa bertujuan untuk meringankan beban siswa miskin.

Menurut Ketua Komite SDN Nomor 04 Bengkuang Kecamatan Kelam Permai dijelaskan bahwa kinerja kepala sekolah dalam penyaluran beasiswa bagi siswa miskin sudah baik karena tugas dan fungsi sebagai kepala sekolah dapat dijalankan dengan benar dan terbuka. Dimana kepala sekolah beserta komite sekolah, dewan guru dan wali murid telah membuat perencanaan penyaluran beasiswa dan pelaksanaan rencana tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Selain itu, kinerja kepala sekolah juga dapat dilihat dari kesungguhan kepala sekolah untuk memperjuangkan siswa miskin yang ada di SDN Nomor 04 Bengkuang Kecamatan Kelam Permai untuk mendapatkan beasiswa dengan cara melakukan komunikasi yang intensif dengan Dinas Pendidikan Kecamatan Kelam Permai dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.

Kepala sekolah berusaha memperjuangkan nasib siswa miskin yang ada di SDN Nomor 04 Bengkuang Kecamatan Kelam Permai untuk mendapatkan beasiswa. Ini dilakukan sebagai wujud tanggungjawab kepala sekolah sebagai pendidik sekaligus motivator bagi siswa miskin di SDN Nomor 04 Bengkuang Kecamatan Kelam Permai. Di samping itu, kinerja kepala sekolah dalam penyaluran beasiswa juga dapat dilihat dari proses pendataan sampai dengan proses pengajuan beasiswa. Dimana kepala sekolah dalam melakukan pendataan juga sempat mendatangi rumah siswa miskin untuk memastikan kondisi riil siswa tersebut.

Selain itu, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam penyaluran beasiswa miskin, kepala sekolah membuat buku kas beasiswa sebagai pertanggungjawaban kepada komite sekolah, orang tua siswa, Dinas

Pendidikan Kabupaten Sintang dan Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam proses penyaluran beasiswa, komite sekolah dilibatkan dalam pengawasan. Ini dilakukan untuk memastikan beasiswa tepat sasaran, transparansi penyaluran dan bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Penyaluran beasiswa akan jauh dari penyimpangan apabila ada yang mengawasi sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana penyaluran beasiswa.

Demikian pula, kinerja kepala sekolah dalam penyaluran beasiswa bagi siswa miskin juga harus diawasi. Pengawasan bisa dilakukan oleh komite sekolah dan dewan guru. Pengawasan ini dilakukan mulai dari pendataan siswa miskin sampai dengan penyaluran beasiswa kepada siswa miskin.

Menurut Siswa miskin SDN Nomor 04 Bengkuang Kecamatan Kelay Permai bahwa kepala sekolah bekerja keras untuk mendata siswa yang tidak mampu kemudian mengusulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang untuk mendapatkan beasiswa bagi siswa miskin. Tidak jarang kepala sekolah menanyakan kondisi keluarga dan mendatangi rumah siswa miskin. Selain itu, dilihat dari kinerja, kepala sekolah sudah semaksimal mungkin agar penyaluran beasiswa tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga diharapkan tidak ada siswa yang putus sekolah.

Kinerja kepala sekolah dalam penyaluran beasiswa bagi siswa miskin di SDN Nomor 04 Bengkuang Kecamatan Kelay Permai dapat diukur dari hasil pelaksanaan penyaluran beasiswa miskin yang sudah 3 (tiga) kali tidak mengalami hambatan. Dengan keberhasilan ini, menunjukkan bahwa kepala sekolah mampu bekerja dan menjalankan amanah untuk memimpin SDN

Nomor 04 Bengkuang Kecamatan Kelam Permai. Selain itu juga tidak adanya penyelewengan maupun pungutan yang dilakukan oleh kepala sekolah.

Menurut kepala sekolah SDN Nomor 04 Bengkuang Kecamatan Kelam Permai bahwa kinerja kepala sekolah dalam penyaluran beasiswa miskin diawali dengan proses perencanaan dengan pendataan siswa miskin. Pendataan dilakukan bermusyawarah dengan komite sekolah, dewan guru dan wali murid, kemudian hasil pendataan ini diajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Setelah ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang bahwa beasiswa miskin sudah dapat diambil di kantor pos, maka kepala sekolah mengundang komite sekolah dan orang tua siswa miskin untuk mengadakan musyawarah, siapa yang akan mewakili komite sekolah dan siswa ikut kepala sekolah mengambil dana beasiswa miskin di kantor pos.

Dalam proses penyaluran beasiswa, kinerja kepala sekolah diawali oleh komite sekolah agar tidak terjadi penyimpangan, seperti beasiswa tidak diberikan sesuai dengan nama yang tercantum dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, atau adanya potongan atau pungutan melebihi dari kesepakatan terhadap beasiswa tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kinerja kepala sekolah dapat dikatakan sudah baik, selain karena lancarnya penyaluran beasiswa juga karena SDN Nomor 04 Bengkuang Kecamatan Kelam Permai sudah 3 (tiga) kali mendapatkan beasiswa bagi siswa miskin. Ini berarti bahwa kepala sekolah bisa mempertanggungjawabkan penyaluran beasiswa bagi siswa miskin.

Menurut Ketua Komite SDN Nomor 04 Bengkuang Kecamatan Kelam Permai bahwa kepemimpinan kepala sekolah dalam penyaluran beasiswa bagi siswa miskin menggunakan gaya kepemimpinan demokratis yang dilakukan secara terbuka. Kepala sekolah selalu mengajak komite sekolah dan orang tua murid untuk bermusyawarah mulai dari perencanaan, pendataan, pengambilan dana beasiswa sampai dengan penyaluran beasiswa. Kemampuan kepala sekolah dalam memimpin tidak lepas dari cara atau gaya yang dipakai kepala sekolah untuk melakukan komunikasi dengan komite sekolah dan orang tua murid. Dengan mau mendengar pendapat, ide, saran dari orang lain berarti kepala sekolah secara langsung menerapkan nilai-nilai demokrasi. Meskipun perbedaan pendapat itu pasti ada, namun dengan besar hati mau menerima perbedaan itu merupakan suatu yang tidak mudah.

Seorang pemimpin akan berhasil atau gagal dari kepemimpinannya tergantung bagaimana pemimpin tersebut menggunakan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya agar mengikuti keinginannya. Gaya kepemimpinan demokratis dapat efektif dilaksanakan apabila kondisi bawahan mempunyai kesadaran dan kedisiplinan yang tinggi. Sedangkan gaya kepemimpinan otoriter diterapkan pada bawahan yang susah diatur maupun tidak disiplin. Demikian pula dalam penyaluran beasiswa bagi siswa miskin berhubung komite sekolah dan orang tua murid mudah diatur maka gaya kepemimpinan yang cocok adalah gaya kepemimpinan demokratis.

Kepemimpinan kepala sekolah dalam penyaluran beasiswa bagi siswa miskin menggunakan gaya demokratis yaitu selalu mengajak komite sekolah dan orang tua murid untuk bermusyawarah, kepala sekolah mau menerima masukan dan saran terhadap proses penyaluran beasiswa yang harus diserahkan kepada orang tua murid daripada ke siswa yang bersangkutan. Ini menunjukkan bahwa kepala sekolah menghormati ide, gagasan dan pendapat orang lain. Dengan demikian maka orang lain akan merasa dihargai sehingga menimbulkan motivasi untuk ikut menyukseskan penyaluran beasiswa bagi siswa miskin.

Hasil wawancara dengan kepala sekolah dijelaskan bahwa dalam penyaluran beasiswa bagi siswa miskin, kepala sekolah menggunakan gaya demokratis dengan cara mengajak komite sekolah dan orang tua murid untuk bermusyawarah dalam proses pendataan, pengajuan calon penerima beasiswa, pengambilan dana beasiswa dan penyaluran beasiswa. Kepala sekolah juga meminta masukan bagi cara yang terbaik agar penyaluran beasiswa dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran sehingga semua kegiatan dapat dilakukan secara transparan dan bertanggungjawab.

Kepala sekolah melakukan pendekatan persuasif dengan mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyukseskan penyaluran beasiswa bagi siswa miskin sehingga mereka tidak putus sekolah serta meringankan beban ekonomi orang tua siswa miskin. Dengan demikian maka mereka merasa diajak untuk ikut peduli dengan nasib orang lain.

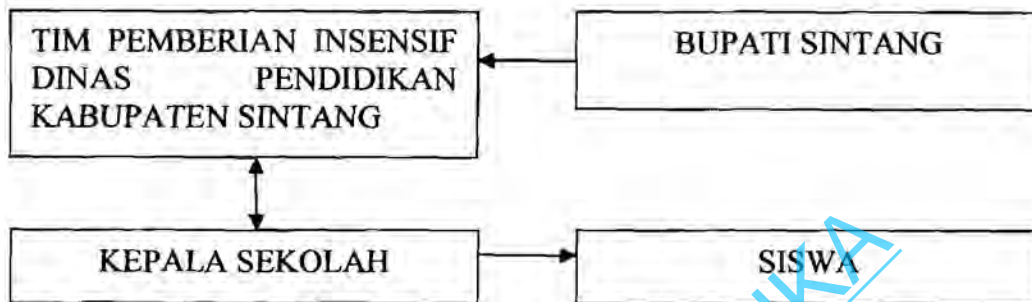
Dengan gaya demokratis dalam kepemimpinannya, kepala sekolah berhasil mengajak komite sekolah dan orang tua murid untuk mengawasi dan memperlancar penyaluran beasiswa sehingga tepat sasaran, tidak adanya penyimpangan, dilakukan secara transparan dan bertanggungjawab. Dengan demikian gaya kepemimpinan kepala sekolah memberi pengaruh yang positif atau mendukung dalam penyaluran beasiswa bagi siswa miskin di SDN Nomor 04 Bengkuang Kecamatan Kelam Permai. Hal ini terbukti sudah tiga kali SDN Nomor 04 Bengkuang Kecamatan Kelam Permai mendapatkan jatah beasiswa bagi siswa miskin.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan penyaluran bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP), yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak

Untuk menjamin pengelolaan program Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar berjalan tertib dan lancar, tepat waktu dan tepat sasaran, maka perlu dibentuk organisasi pengelola, baik di tingkat Kabupaten. Organisasi pengelola ini berfungsi untuk melaksanakan dan atau mengimplementasikan program ini sampai kepada sasaran yang telah ditetapkan. Struktur Organisasi Tim Pengelola Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Gambar 4.3. Struktur Organisasi Tim Pengelola Dana Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar di Kabupaten Sintang



Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran beasiswa bagi siswa miskin jenjang sekolah dasar Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah

Fungsi dan Tugas Pengelola Tingkat Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan program pemberian dana Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar kepada Kepala Sekolah di wilayah masing-masing.
2. Menetapkan kuota Penerima Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar pada setiap sekolah di Kabupaten Sintang
3. Menerima usulan calon penerima dana Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar dari Kepala Sekolah, melakukan penelitian dan seleksi kelengkapan administrasi siswa calon penerima Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar yang diajukan oleh Kepala berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan penerima Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar dan sesuai dengan kuota masing-masing sekolah yang ditentukan di Kabupaten Sintang.
4. Menyampaikan usulan penerima Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar

kepada Bupati Sintang, setelah memenuhi kelengkapan administrasi

penerima Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar yang diusulkan oleh Sekolah untuk mendapat persetujuan.

5. Mengarsipkan dan atau menyimpan *hard copy* data individu siswa penerima dana Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar untuk digunakan sebagai acuan pengajuan usulan untuk tahun berikutnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan berkaitan dengan mekanisme penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyaluran bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang disimpulkan sebagai berikut: Penentuan siswa yang akan menerima beasiswa sepenuhnya menjadi otoritas komite sekolah yang sebetulnya kurang memahami kondisi obyektif keluarga siswa. Pihak komite sekolah hanya mengandalkan data yang diberikan oleh siswa atau masukan antar anggota tim tanpa mengecek ke lapangan. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak siswa yang seharusnya lebih layak menerima beasiswa, tetapi tidak mendapatkannya. Orang tua siswa atau siswa yang bersangkutan tidak mempunyai akses untuk mengusulkan diri sebagai penerima beasiswa. Demikian halnya dalam penentuan sekolah yang berhak menerima dana bantuan operasional, yang tidak mendasarkan diri pada kondisi obyektif masing-masing sekolah. Sekolah tidak diberi kesempatan untuk mengusulkan diri untuk menerima dana bantuan

operasional. Konsekuensinya, sangat dimungkinkan sekolah yang seharusnya lebih layak menerima, justru tidak memperolehnya karena tidak diusulkan. Sistem target dalam menentukan kelompok sasaran calon penerima beasiswa jelas mencerminkan masih kuatnya pola sentralisasi dalam penentuan dan pengalokasian Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD). Penentuan sasaran dengan sistem ini dapat keliru di lapangan, terlebih lagi kalau diwarnai dengan sikap subyektif dari komite sekolah dalam penentuan beasiswa. Informasi mengenai beasiswa, yang tidak ditempel di papan pengumuman sekolah (terjadi di SD pada daerah penelitian), dapat mendorong terjadinya penyimpangan dalam penentuan calon penerima beasiswa. Siswa yang tidak memiliki cukup informasi mengenai beasiswa tersebut, sudah dapat dipastikan tidak dapat mengusulkan diri atau melalui orang tuanya untuk memperoleh beasiswa.

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan penyaluran bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di Desa Bengkuang Kecamatan Kalam Permai Kabupaten Sintang disimpulkan: Pelaksanaan tugas kepala sekolah dalam penyaluran beasiswa bagi siswa miskin jenjang sekolah dasar sudah berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan kepemimpinan kepala sekolah yang tegas baik sebagai seorang edukator maupun motivator, kinerja kepala sekolah yang baik mulai dari pendataan sampai dengan penyaluran beasiswa bagi siswa miskin tanpa adanya penyimpangan atau penyalahgunaan dana beasiswa serta program beasiswa

berjalan dengan baik selama 3 (tiga) tahun sudah tepat sasaran. Pelaksanaan tugas kepala sekolah dalam pelaksanaan penyaluran beasiswa bagi siswa miskin jenjang sekolah dasar sangat didukung oleh adanya koordinasi yang baik antara kepala sekolah dengan komite sekolah dan orang tua murid dalam bentuk musyawarah atau rapat serta terjun ke lapangan. Selain gaya kepemimpinan yang demokratis juga mendukung pelaksanaan penyaluran beasiswa bagi siswa miskin.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penentuan siswa yang berhak menerima beasiswa seharusnya tidak hanya mendasarkan pada data yang diberikan oleh siswa atau komite sekolah, tetapi dilakukan pengecekan ke lapangan.
2. Penerapan kebijakan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) tidak dapat mempergunakan sistem target tetapi harus menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Dengan demikian akan bersifat *local specific*, atau masing-masing daerah akan memiliki standar tersendiri. Untuk itu, sebaiknya program beasiswa dimasukkan ke dalam program anggaran rutin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga berkelanjutan atau dapat diteruskan. Pola penganggaran program beasiswa dengan sistem proyek bukan saja menyebabkan terputusnya kesinambungan program,

tetapi juga memungkinkan terjadinya missmanajemen karena sifatnya yang tidak tetap.

3. Perlunya diciptakan pemahaman yang utuh atas isi kebijakan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) oleh pelaksana di lapangan, yang meliputi Dinas Pendidikan Kabupaten, komite sekolah, dan kantor pos pembayar, dengan disertai sanksi dan penghargaan yang sesuai apabila melanggar atau mampu memenuhi sesuai aturan. Untuk itu, agar dilakukan sosialisasi dengan para anggota komite sekolah dalam mengelola Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD), sehingga dalam penerapannya tidak terjadi penyimpangan, seperti misalnya dalam kasus pengambilan dana beasiswa dan pemotongan langsung.
4. Perlunya disosialisasikan ke masyarakat isi program Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) agar masyarakat dapat mengontrol implementasi program tersebut. Untuk itu, agar fungsi dan peran komite sekolah dikembalikan sebagai organisasi yang membantu atau memfasilitasi penetapan dan penyaluran beasiswa, sedangkan masyarakat berperan memberikan data obyektif dan mengontrol implementasi kebijakan tersebut.
5. Diharapkan koordinasi antara kepala sekolah, komite sekolah, orang tua murid serta Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang terus ditingkatkan agar pendataan, pengusulan calon penerima beasiswa, pengambilan dana beasiswa dan penyaluran beasiswa dapat berjalan sesuai dengan rencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad R. (2006). *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. (2003). *Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran beasiswa bagi siswa miskin jenjang sekolah dasar Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta.
- _____. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdiknas
- Dwiyanto, Agus, (1999), *Evaluasi Program dan Kebijaksanaan Pemerintah, Pelatihan dan Teknik Manajemen Kebijakan Publik*, Angkatan II, UGM, Yogyakarta.
- Dunn, N. William, (2000), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, dalam Muhadjir Darwin (Penyunting), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Gunawan, A.H. (1996). *Administrasi Sekolah. Administrasi Pendidikan Mikro*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Handyaningrat, S. (1980). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Handoko, T.H. (1999). *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Hoogerwerf, A, (1985), *Ilmu Pemerintahan* (alih bahasa oleh R.L.L. Tobing), PT.Erlangga, Jakarta.
- Islamy, M.I. (2000). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mangkunegara, A. P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Martin, Lawrence L dan Kettner, M Peter, (1996), *Measuring The Peformance of Human Service Programs*, International Educational and Professional Publisher Thousand Oaks, London New Delhi, California.
- Mathis, R.L. dan Jackson, John H. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyasa, E. (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mulyono. (2008). *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nitisasmito. (1983). *Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Nurkolis. (2005). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Prawirosentono, S. (1999). *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.
- Purwanto, M.N. (1997). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Putra, Fadillah, (2001), *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Ridwan. (2003). *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta : PT. Gramedia Wididasarana Indonesia.
- Sarwoto. (1981). *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Siagian, S.P. (2003). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. (2005). *Kepemimpinan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Siswanto, B. (2002). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia (Pendekatan Administratif dan Operasional)*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- _____. (2003). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Siswanto, H.B.(2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, A.G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugandha. (1991). *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta: Inter Media.
- Sulistiyani. A.T. (2003). *Pengembangan Karyawan Perusahaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutarto. (1998). *Pengantar Ilmu administrasi dan Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Syarifudin. (1976). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
-

- Van Meter, Donald S and Carl, E Van Horn, (1975), *The Policy Implementation Process A Conceptual Framework in Administration and Society*, Volume, 6 No. 4, Sage, Beverly Hills.
- Wahab, SA. (2001). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahjosumidjo. (2003). *Kepemimpinan Kepala Sekolah. Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wirasasmita. (1991). *Pelaksanaan Koordinasi Instansi Pemerintah*. Jakarta: Gramedia.

UNIVERSITAS TERBUKA

PEDOMAN OBSERVASI

- 1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian**
 - a. Nama sekolah
 - b. Visi dan misi sekolah
 - c. Jumlah Murid Masing-Masing Kelas
 - d. Jumlah Murid Berdasarkan Jenis Kelamin
 - e. Jumlah Murid Menurut Kelompok Umur
 - f. Jumlah Guru Berdasarkan Jenis Kelamin
 - g. Jumlah Guru Berdasarkan Tingkat Pendidikan
 - h. Sarana dan Prasarana Sekolah
 - i. Prestasi Akademik Siswa
 - j. Prestasi Non Akademik Siswa
- 2. Komponen penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD)**
 - a. Kriteria Calon Siswa Penerima Beasiswa
 - b. Kriteria Penetapan Siswa Penerima Beasiswa
 - c. Cara Pengambilan Dana Beasiswa
 - d. Jenis Penggunaan Dana Beasiswa
- 3. Komponen Tugas Kepala Sekolah Dalam Pelaksanaan Penyaluran Beasiswa Bagi Siswa Miskin Jenjang Sekolah Dasar**
 - a. Tugas Kepemimpinan Kepala Sekolah
 - b. Tugas Koordinasi
 - c. Tingkat pemahaman isi kebijakan

PEDOMAN WAWANCARA
(Ditujukan kepada Komite Sekolah dan Orang Tua Siswa)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan pointer pertanyaan berdasarkan ruang lingkup penelitian. Perinciannya dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada subjek penelitian dikembangkan di lapangan.

Identitas Subjek Penelitian

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Jabatan :
6. Lama bekerja :
7. Alamat :

A. Mekanisme penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD)

1. Penentuan Kriteria Calon Siswa Penerima Beasiswa

- a. Keterlibatan dalam Penentuan penerima / proses seleksi Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD)
- b. Keterlibatan dalam penetapan Jumlah siswa penerima beasiswa

2. Penetapan Siswa Penerima Beasiswa

- a. Keterlibatan dalam Tahapan penetapan siswa penerima beasiswa
- b. Pengumuman bagi siswa penerima beasiswa
- c. Laporan pengaduan terhadap penetapan siswa penerima beasiswa

3. Pengambilan Dana Beasiswa

- a. Pemahaman terhadap Prosedur pengambilan dana beasiswa
- b. Pemahaman terhadap Tempat pengambilan dana beasiswa
- c. Pemahaman terhadap Jumlah dana beasiswa yang diterima

4. Penggunaan Dana Beasiswa

- a. Kriteria penggunaan dana beasiswa
- b. Intervensi sekolah dalam penggunaan dana beasiswa
- c. Laporan penggunaan dana beasiswa

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Kepala Sekolah Dalam Pelaksanaan Penyaluran Beasiswa Bagi Siswa Miskin Jenjang Sekolah Dasar

1. Tanggapan terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah

- a. Komitmen
- b. Perencanaan
- c. Pengambilan keputusan
- d. Mengorganisasikan semua kegiatan
- e. Memberikan motivasi
- f. Melakukan pengawasan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan kegiatan
- g. Menyusun laporan.

2. Koordinasi

- a. Jenis koordinasi
- b. Pendekatan koordinasi
- c. Prinsip koordinasi
- d. Sarana koordinasi
- e. Pola koordinasi
- f. Pedoman koordinasi

3. Anggaran

- a. Ketersediaan anggaran pendukung
- b. Penggunaan anggaran pendukung

4. Tingkat pemahaman isi kebijakan

- a. Tingkat pemahaman Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang
- b. Tingkat pemahaman Kepala Sekolah
- c. Tingkat pemahaman Orang Tua Siswa
- d. Tingkat pemahaman Komite Sekolah

5. Kontrol masyarakat

- a. Kontrol terhadap Penentuan Kriteria Calon Siswa Penerima Beasiswa
- b. Kontrol terhadap Penetapan Siswa Penerima Beasiswa
- c. Kontrol terhadap Pengambilan Dana Beasiswa
- d. Kontrol terhadap Penggunaan Dana Beasiswa

PEDOMAN WAWANCARA
(Ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan pointer pertanyaan berdasarkan ruang lingkup penelitian. Perinciannya dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada subjek penelitian dikembangkan di lapangan.

Identitas Subjek Penelitian

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Jabatan :
6. Lama bekerja :
7. Alamat :

A. Mekanisme penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD)

1. Penentuan Kriteria Calon Siswa Penerima Beasiswa

- a. Penentuan penerima / proses seleksi Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD)
- b. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh sekolah penerima Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD)
- c. Jumlah siswa penerima beasiswa
- d. Keseuaian kriteria penerima beasiswa

2. Penetapan Siswa Penerima Beasiswa

- a. Tahapan penetapan siswa penerima beasiswa
- b. Pengumuman bagi siswa penerima beasiswa
- c. Laporan pengaduan terhadap penetapan siswa penerima beasiswa

3. Pengambilan Dana Beasiswa

- a. Prosedur pengambilan dana beasiswa
- b. Tempat pengambilan dana beasiswa
- c. Jumlah dana beasiswa yang diterima

4. Penggunaan Dana Beasiswa

- a. Kriteria penggunaan dana beasiswa
- b. Intervensi sekolah dalam penggunaan dana beasiswa
- c. Laporan penggunaan dana beasiswa

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Kepala Sekolah Dalam Pelaksanaan Penyaluran Beasiswa Bagi Siswa Miskin Jenjang Sekolah Dasar

1. Kepemimpinan Kepala Sekolah

- a. Komitmen
- b. Perencanaan
- c. Pengambilan keputusan
- d. Mengorganisasikan semua kegiatan
- e. Memberikan motivasi
- f. Melakukan pengawasan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan kegiatan
- g. Menyusun laporan.

2. Koordinasi

- a. Jenis koordinasi
- b. Pendekatan koordinasi
- c. Prinsip koordinasi
- d. Sarana koordinasi
- e. Pola koordinasi
- f. Pedoman koordinasi

3. Anggaran

- a. Ketersediaan anggaran pendukung
- b. Penggunaan anggaran pendukung

4. Tingkat pemahaman isi kebijakan

- a. Tingkat pemahaman Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang
- b. Tingkat pemahaman Kepala Sekolah
- c. Tingkat pemahaman Orang Tua Siswa
- d. Tingkat pemahaman Komite Sekolah

5. Kontrol masyarakat

- a. Kontrol terhadap Penentuan Kriteria Calon Siswa Penerima Beasiswa
- b. Kontrol terhadap Penetapan Siswa Penerima Beasiswa
- c. Kontrol terhadap Pengambilan Dana Beasiswa
- d. Kontrol terhadap Penggunaan Dana Beasiswa

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan/Status
1	Drs. YAT LUKMAN RIBERU, M.SI.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang
2	SIMIN	Kepala SDN Nomor 04 Bengkuang Kecamatan Kelam Permai
3	PANDI	Pengurus Komite Sekolah SDN Nomor 04 Bengkuang
4	GURANG	Orang Tua siswa
5	SIMSON	Orang Tua siswa
6	AHMAD ZAINI	Siswa penerima beasiswa
7	ANASTASIA DWIYANTI	Siswa penerima beasiswa

TRANSKRIP HASIL OBSERVASI

Nama Mahasiswa : **THOMBES KADUKAI FELIPUS**
 NIM : **016758818**
 Judul : **IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN BEASISWA MISKIN SEKOLAH DASAR (BSM-SD) DI SEKOLAH DASAR KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG**
 Lokasi observasi : **Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang SDN 04 Bengkuang**
 Waktu observasi : **Mei – Juni 2013**

Daftar Siswa Miskin yang Diusulkan menerima BSM

Sekolah	Nama Siswa	Jenis Kelamin	Kelas	Nama Ayah	Pekerjaan	Prestasi	Rekomendasi RT/RW
SDN 04 Bengkuang	Ada	Tidak ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penetapan Siswa Penerima Beasiswa

Kegiatan	SDN 04 Bengkuang	
	Ada	Tidak ada
Tahapan penetapan siswa penerima beasiswa	√	
Pengumuman bagi siswa penerima beasiswa		√
Laporan pengaduan terhadap penetapan siswa penerima beasiswa		√

Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan	SDN 04 Bengkuang	
	Sesuai	Tidak sesuai
Jumlah siswa penerima beasiswa	√	
Kesesuaian kriteria penerima beasiswa		√
Prosedur pengambilan dana beasiswa		√
Tempat pengambilan dana beasiswa	√	
Jumlah dana beasiswa yang diterima	√	
Kriteria penggunaan dana beasiswa		√

Intervensi sekolah dalam penggunaan dana beasiswa	√	
Laporan penggunaan dana beasiswa		√

Kepemimpinan Kepala Sekolah

Kepemimpinan Kepala Sekolah	SDN 04 Bengkuang		
	Baik	Sedang	Kurang baik
Komitmen		√	
Perencanaan		√	
Pengambilan keputusan		√	
Mengorganisasikan semua kegiatan		√	
Memberikan motivasi		√	
Melakukan pengawasan		√	
Pelaporan		√	

Tingkat pemahaman isi kebijakan

Tingkat pemahaman	Keterangan		
	Baik	Sedang	Kurang baik
Tingkat pemahaman Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang	√		
Tingkat pemahaman Kepala Sekolah		√	
Tingkat pemahaman Orang Tua Siswa			√
Tingkat pemahaman Komite Sekolah			√

Kontrol Masyarakat

Kegiatan	SDN 04 Bengkuang	
	Ada	Tidak ada
Kontrol terhadap Penentuan Kriteria Calon Siswa Penerima Beasiswa		√
Kontrol terhadap Penetapan Siswa Penerima Beasiswa		√
Kontrol terhadap Pengambilan Dana Beasiswa		√
Kontrol terhadap Pengambilan Dana Beasiswa		√

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa : **THOMBES KADUKAI FELIPUS**
 NIM : **016758818**
 Judul : **MEKANISME PENYALURAN BANTUAN BEASISWA MISKIN SEKOLAH DASAR (BSM-SD) DI SEKOLAH DASAR KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG**
 Nama Yang : **Drs. YAT LUKMAN RIBERU, M.SI. (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang)**
 Diwawancara : **Pendidikan Kabupaten Sintang)**
 Waktu wawancara : **Mei – Juni 2013**

A. Mekanisme penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD)

1. Penentuan Kriteria Calon Siswa Penerima Beasiswa

a. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang (Drs. Y.A.T. Lukman Riberu, M. Si) bagaimanakah proses Penentuan penerima / proses seleksi Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD):

Jawab:

- 1) Siswa yang terdaftar dan masih aktif sebagai siswa;
- 2) Siswa SD yang orang tuanya tidak mampu atau miskin yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan tempat tinggal orang tua siswa;
- 3) Siswa yang tidak menerima bantuan/beasiswa dari sumber lain yang sifat bantuannya sama;
- 4) Siswa yang bersangkutan diusulkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan, melalui Pengelola Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten Sintang dan mendapat persetujuan dari Bupati Sintang sebagai calon penerima.
- 5) Ditetapkan sebagai Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar oleh Pengelola Tingkat Kabupaten;

b. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh sekolah penerima Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD)

Jawab:

- 1) Sekolah yang memiliki siswa berasal dari keluarga kurang mampu/miskin.
- 2) Diutamakan berada dalam wilayah atau peta angka kemiskinan tinggi dan juga termasuk daerah tertinggal.

c. Jumlah siswa penerima beasiswa

Jawab:

Sebanyak 26.481 pelajar di Kabupaten Sintang, Untuk pelajar SD ada 20.948 pelajar yang akan menerima beasiswa tersebut.

d. Keseuaian kriteria penerima beasiswa

Jawab:

Penerima BSM adalah siswa kelas 3 (tiga) sampai 5 (lima). Hal ini diharapkan terjaganya kesinambungan penerimaan beasiswa pada tahun pelajaran ganjil berikutnya pada tahun anggaran berjalan. Adapun kriteria siswa penerima BSM sebagai berikut : Berasal dari keluarga kurang mampu/miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari RT dan RW setempat. Diprioritaskan bagi siswa madrasah sebagai anggota keluarga Program Keluarga Harapan (PKH), dibuktikan dengan menunjukkan kartu PKH dari Kementerian Sosial. Memiliki kepribadian terpuji. Diputuskan melalui rapat Komite Madrasah.

2. Penetapan Siswa Penerima Beasiswa

Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang apa sajakah Tahapan penetapan siswa penerima beasiswa

a. Tahapan Penetapan Siswa Penerima Beasiswa

Jawab:

Kepala Sekolah bersama-sama dengan Komite Sekolah menyeleksi dan menetapkan usulan siswa penerima Bantuan Beasiswa Siswa Miskin dengan kriteria sebagai berikut : Siswa yang berasal dari keluarga kurang/tidak mampu (berdasarkan data yang dimiliki sekolah) . Jarak tempat tinggal jauh dari sekolah. Memiliki lebih dari tiga saudara yang berusia sekolah. Pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, anak dari korban PHK, dan indikator lokal lainnya). Diutamakan siswa yang memiliki Kartu Miskin atau Kartu Program Keluarga Harapan.

b. Pengumuman bagi siswa penerima beasiswa

Jawab:

Wajib dilakukan kepala sekolah mengumumkan kepada masyarakat di papan informasi mengenai dana BSM yang diterima

c. Laporan pengaduan terhadap penetapan siswa penerima beasiswa

Jawab:

Adanya keberatan terhadap siswa penerima

3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Bagaimanakah cara Pengambilan Dana Beasiswa

Jawab:

Pengambilan BSM dilakukan di lembaga penyalur yang ditunjuk sebesar dana yang disalurkan secara utuh, tanpa ada pemotongan atau pungutan biaya apapun dan oleh pihak manapun serta dalam bentuk apapun.

4. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Bagaimanakah Penggunaan Dana Beasiswa

Jawab:

Biaya Pribadi Siswa Miskin adalah biaya yang akan dimanfaatkan oleh siswa untuk kebutuhan perongkosan dari rumah menuju sekolah atau pulang dari sekolah menuju ke rumah, biaya pembelian sepatu sekolah dan baju seragam sekolah, tas sekolah atau biaya pembelian alat tulis dan buku tulis.

B. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Kepala Sekolah Dalam Pelaksanaan Penyaluran Beasiswa Bagi Siswa Miskin Jenjang Sekolah Dasar:

1. Kepemimpinan Kepala Sekolah

a. Komitmen

Jawab: cukup baik

b. Perencanaan

Jawab: cukup baik

c. Pengambilan keputusan

Jawab: cukup baik

d. Mengorganisasikan semua kegiatan

Jawab: cukup baik

e. Memberikan motivasi

Jawab: cukup baik

f. Melakukan pengawasan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan kegiatan

Jawab: cukup baik

g. Menyusun laporan.

Jawab: cukup baik

2. Koordinasi

a. Jenis koordinasi

Jawab: cukup efektif

b. Pendekatan koordinasi

Jawab: cukup efektif

c. Prinsip koordinasi

Jawab: cukup efektif

- d. Sarana koordinasi
Jawab: cukup efektif
- e. Pola koordinasi
Jawab: cukup efektif
- f. Pedoman koordinasi
Jawab: cukup efektif

3. Anggaran

- a. Ketersediaan anggaran pendukung
Jawab: cukup tersedia
- b. Penggunaan anggaran pendukung
Jawab: sudah sesuai

4. Tingkat pemahaman isi kebijakan

- a. Tingkat pemahaman Kepala Sekolah
Jawab: cukup baik
- b. Tingkat pemahaman Orang Tua Siswa
Jawab: cukup baik
- c. Tingkat pemahaman Komite Sekolah
Jawab: cukup baik

5. Kontrol masyarakat

- a. Kontrol terhadap Penentuan Kriteria Calon Siswa Penerima Beasiswa
Jawab: cukup baik
- b. Kontrol terhadap Penetapan Siswa Penerima Beasiswa
Jawab: cukup baik
- c. Kontrol terhadap Pengambilan Dana Beasiswa
Jawab: cukup baik
- d. Kontrol terhadap Penggunaan Dana Beasiswa
Jawab: cukup baik

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa : **THOMBES KADUKAI FELIPUS**
 NIM : **016758818**
 Judul : **MEKANISME PENYALURAN BANTUAN BEASISWA MISKIN SEKOLAH DASAR (BSM-SD) DI SEKOLAH DASAR KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG**
 Nama Yang : **Kepala SDN 04 Bengkuang**
 Diwawancara
 Waktu wawancara : **Mei – Juni 2013**

1. Penentuan Kriteria Calon Siswa Penerima Beasiswa

- a. Bapak Kepala Sekolah SDN No. 4 Bengkuang (Simin) Bagaimanakah Penentuan penerima / proses seleksi Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD)
 Jawab: sudah ada kriterianya
- b. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh sekolah penerima Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD)
 Jawab: sepenuhnya urusan Dinas Pendidikan
- c. Jumlah siswa penerima beasiswa
 Jawab: sudah ditentukan oleh dinas pendidikan, kami hanya mengusulkan
- d. Kesesuaian kriteria penerima beasiswa
 Jawab: sudah sesuai

2. Penetapan Siswa Penerima Beasiswa

- a. Bapak Kepala Sekolah SDN No. 4 Bengkuang (Simin) apa sajakah Tahapan penetapan siswa penerima beasiswa
 Jawab: mendata siswa miskin terlebih dahulu
- b. Pengumuman bagi siswa penerima beasiswa
 Jawab: melalui surat kepada orang tua siswa
- c. Laporan pengaduan terhadap penetapan siswa penerima beasiswa
 Jawab: tidak ada yang komplain

3. Pengambilan Dana Beasiswa

- a. Bapak Kepala Sekolah SDN No. 4 Bengkuang (Simin) bagaimanakah cara atau Prosedur pengambilan dana beasiswa
Jawab: sesuai aturan
- b. Tempat pengambilan dana beasiswa
Jawab: kantor pos Kecamatan kelam Permai (desa Kebong)
- c. Jumlah dana beasiswa yang diterima
Jawab: Rp 360.000 per siswa per tahun

4. Penggunaan Dana Beasiswa

- a. Bapak Kepala Sekolah SDN No. 4 Bengkuang (Simin) bagaimanakah cara penggunaan dana beasiswa
Jawab: macam – macam untuk uang transport, beli buku, tas, sepatu dll. Ada juga yang tidak sesuai (bukan untuk keperluan sekolah)
- b. Intervensi sekolah dalam penggunaan dana beasiswa
Jawab: tidak ada, sepenuhnya kembali kepada orang tua siswa
- c. Laporan penggunaan dana beasiswa
Jawab: sudah disampaikan kepada Dinas Dendidikan



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 4 BENGKUANG
 Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 420/067/SD-BK/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala SDN. No. 4 Bengkuang dengan ini menerangkan :

Nama : Thombes Kadukai Felipus
 NIM : 016758818
 Fakultas : Ilmu Administrasi
 Jurusan/PR.Studi : Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Judul Tesis : Mekanisme Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di Sekolah Dasar Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.

bahwa nama tersebut diatas adalah Mahasiswa Universitas Terbuka Indonesia UPBJJ Pontianak yang telah melaksanakan Penelitian dan Pengumpulan data pada SDN. No. 4 Bengkuang sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi pada Universitas Terbuka Indonesia UPBJJ Pontianak.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkuang
 Pada tanggal : 7 Juni 2013

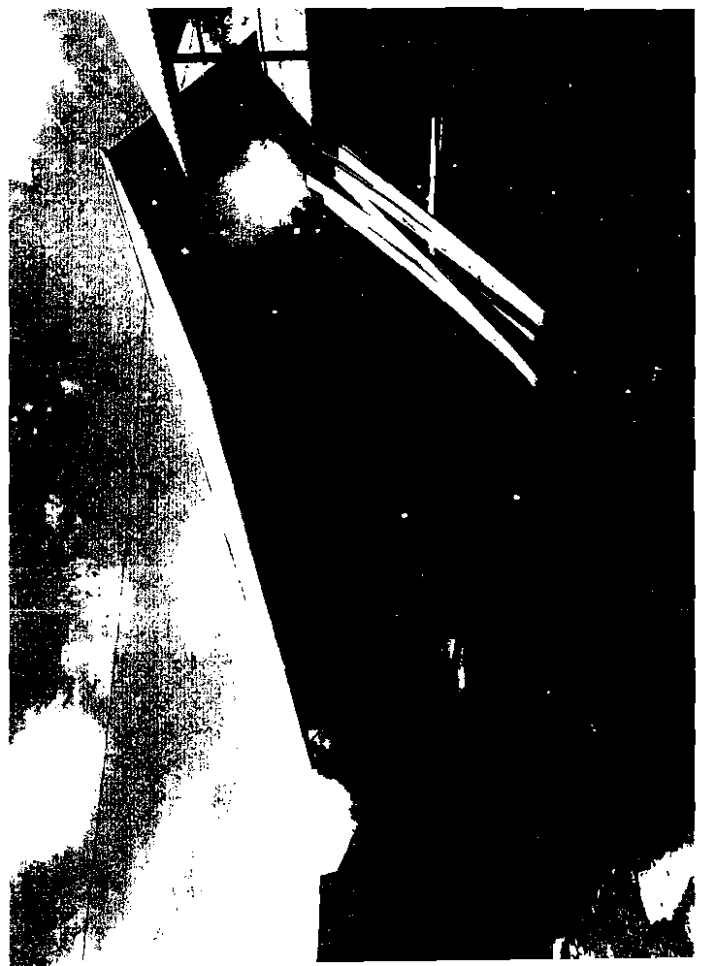
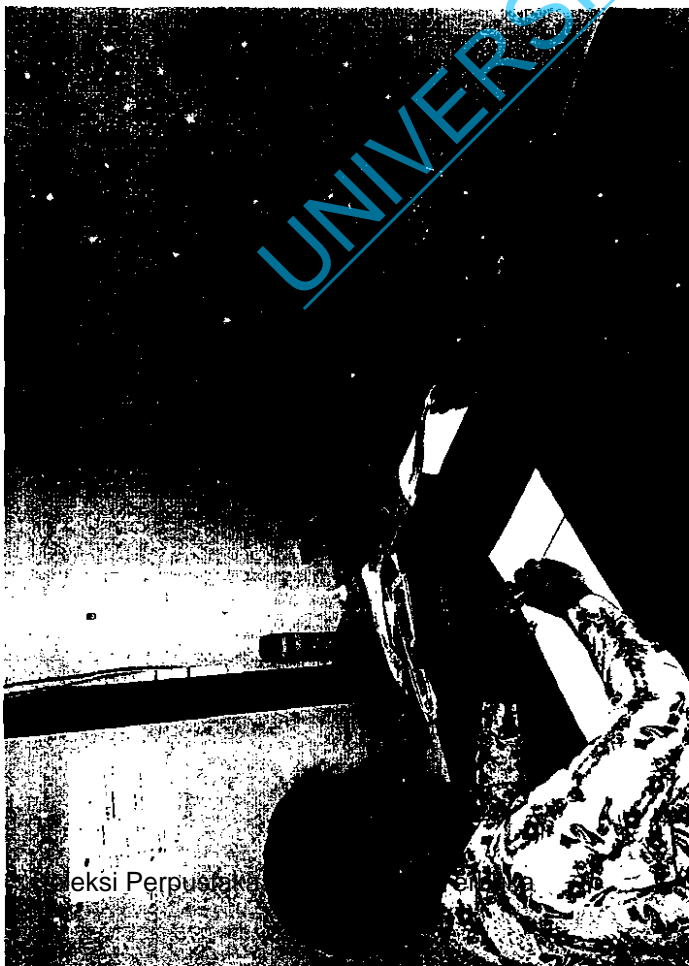
Kepala SDN No. 4 Bengkuang



EMIN

Pembina

NIP. 19570910 198403 1 001



UNIVERSITAS TERBUKA

